

CONSULTATIVE PAPER

PERSYARATAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2018

KATA PENGANTAR

Risiko Kredit adalah bagian dari kerangka permodalan Basel Pilar 1 (*Minimum Capital Requirements*) dan termasuk dalam standar *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang diatur dalam dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*ⁱ. Dokumen yang dipublikasikan pada tahun 2006 tersebut merupakan upaya BCBS dalam menyempurnakan ketahanan dan stabilitas industri perbankan melalui ketiga pilarnya (*Minimum Capital Requirements, Supervisory Review Process, Market Discipline*).

BCBS telah memutuskan bahwa dokumen *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* perlu diperbarui sebagai respon terhadap krisis keuangan global dan sebagai upaya memperbaiki kelemahan yang ada pada kerangka tersebut. Melalui dokumen terbarunya, *Basel III: Finalising post-crisis reforms*ⁱⁱ yang dipublikasikan pada bulan Desember 2017, BCBS merevisi beberapa elemen dari kerangka pendahulunya dimana salah satunya adalah meningkatkan keandalan dan sensitivitas dari pendekatan standar untuk risiko kredit melalui pendekatan Pilar 1 (*Minimum Capital Requirements*).

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota BCBS berkomitmen untuk menerapkan *Basel Regulatory Framework* sesuai dengan tenggat waktu (*timeline*) yang ditentukan, dimana salah satunya mencakup penerapan revisi standar risiko kredit. Hal ini tentunya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan revisi standar risiko kredit di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati.

Consultative Paper (CP) ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai penerapan revisi standar risiko kredit di Indonesia. Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2018. Adapun beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi

OJK memandang bahwa sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi revisi standar risiko kredit dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

ⁱ www.bis.org/publ/bcbs128.htm

ⁱⁱ www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm

Daftar isi

Pendahuluan.....	1
A. Eksposur Individu.....	1
Persyaratan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)	1
1. Eksposur kepada Pemerintah	2
2. Eksposur kepada Entitas Sektor Publik.....	3
3. Eksposur kepada Bank Pembangunan Multilateral	4
4. Eksposur kepada Bank.....	5
5. Eksposur dalam bentuk <i>covered bond</i>	9
6. Eksposur kepada perusahaan efek sekuritas dan lembaga keuangan lainnya	12
7. Eksposur kepada korporasi	12
7.1 Eksposur kepada korporasi umum.....	12
7.2 <i>Specialised lending</i>	13
8. Utang subordinasi, ekuitas dan instrumen modal lainnya.....	15
9. Ekposur Ritel.....	18
10. Eksposur Kredit Beragun Properti.....	19
10.1 Eksposur Kredit Beragun rumah tinggal	21
10.2 Eksposur Kredit Beragun properti komersial	23
10.3 Eksposur pembebasan lahan, pembangunan dan konstruksi	25
11. Faktor pengali bobot risiko untuk eksposur tertentu dengan <i>currency mismatch</i>	25
12. Transaksi Rekening Administratif.....	26
13. Eksposur Jatuh Tempo	29
14. Aset lainnya.....	30
B. Pengakuan peringkat eksternal oleh OJK	30
1. Proses Pengakuan	30
2. Kriteria kelayakan	30
C. Pertimbangan implementasi pada yurisdiksi yang memperbolehkan penilaian eksternal	32
1. Proses pemetaan	32
2. Beberapa peringkat eksternal.....	32
3. Penentuan penilaian suatu ekposur: Peringkat Penerbitan Spesifik (<i>Issue-Specific Rating</i>) dan Peringkat Penerbit (<i>Issuer Rating</i>).....	33
4. Peringkat Mata Uang Domestik (<i>Domestic Currency Rating</i>) dan Peringkat Valuta Asing (<i>Foreign Currency Rating</i>).....	34
5. Peringkat jangka-pendek/jangka panjang	34

6.	Tingkat Penggunaan Peringkat	35
7.	Penggunaan peringkat atas inisiatif lembaga pemeringkat (<i>unsolicited ratings</i>).....	35
D.	Teknik Mitigasi Risiko Kredit untuk Eksposur Tertimbang Menurut Risiko Berdasarkan Pendekatan Standar.....	36
1.	Isu-isu keseluruhan.....	36
(i)	Pendahuluan	36
(ii)	Persyaratan Umum	36
(iii)	Persyaratan Legal	37
(iv)	Perlakuan Umum pada Ketidaksesuaian Jatuh Tempo (<i>maturity mismatches</i>).....	37
(v)	Ketidaksesuaian mata uang (<i>currency mismatches</i>)	38
2.	Teknik Mitigasi Risiko Kredit ⁶⁰	38
(i)	Transaksi dengan agunan	38
(ii)	Saling Hapus Dalam Neraca (<i>On-balance Sheet Netting</i>)	39
(iii)	Garansi dan Derivatif Kredit (<i>Credit Derivatives</i>).....	39
3.	Transaksi dengan Agunan (<i>Collateralised transactions</i>).....	39
(i)	Persyaratan Umum	39
(ii)	Pendekatan Sederhana	40
(iii)	Pendekatan Komprehensif	43
(iv)	<i>Haircut Floor</i> Minimum untuk SFTs.....	46
(v)	Transaksi derivatif OTC dengan Agunan.....	49
4.	<i>On-balance sheet netting</i>	50
5.	Garansi dan derivatif kredit	50
(i)	Persyaratan operasional untuk garansi dan derivatif kredit	50
(ii)	Persyaratan operasional khusus untuk garansi	51
(iii)	Persyaratan operasional spesifik untuk derivatif kredit	51
(iv)	Jenis pemberi garansi (pemberi kontra garansi)/penyedia proteksi dan derivatif kredit yang diakui.....	53
(v)	Perlakuan bobot risiko untuk transaksi dengan proteksi kredit yang diakui	54
(vi)	<i>Currency mismatches</i>	54
(vii)	Garansi dan kontra garansi pemerintah.....	55

Pendahuluan

1. Dalam penentuan bobot risiko dengan pendekatan standar untuk jenis eksposur tertentu, mengingat OJK memperbolehkan penggunaan peringkat eksternal, bank dapat menggunakan penilaian oleh lembaga pemeringkat kredit eksternal yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan paragraf 95 sampai 110 di bawah. Pada pendekatan standar, eksposur yang dikenakan bobot risiko adalah eksposur bersih setelah dikurangkan cadangan khusus (termasuk *write-off parsial*).
2. Pengaturan terkait eksposur sekuritisasi¹, kredit derivatif, penyertaan modal, dan eksposur *counterparty credit risk*^{2,3,4} diatur pada regulasi/standar tersendiri.

¹ POJK tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

² *Counterparty credit risk* adalah risiko dimana *counterparty* dapat mengalami kegagalan sebelum adanya setelmen final atas arus kas transaksi. Kerugian ekonomis akan timbul apabila transaksi atau portofolio transaksi terhadap suatu *counterparty* mempunyai nilai ekonomi yang positif pada saat terjadi gagal bayar. Tidak seperti eksposur risiko kredit dalam bentuk pinjaman, dimana eksposur atas risiko kredit bersifat *unilateral* dan hanya bank pemberi pinjaman yang menghadapi risiko dimaksud, *counterparty credit risk* juga menghasilkan kerugian risiko *bilateral* yaitu nilai pasar dari transaksi dapat bernilai positif atau negatif bagi kedua *counterparty* transaksi dan nilai pasar tersebut bersifat tidak pasti serta dapat berubah mengikuti perubahan faktor pasar yang mendasari.

³ SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

⁴ Standar *capital requirements for banks' equity investments in funds terdapat pada www.bis.org/publ/bcbs266.pdf*; dan *capital requirements for bank exposures to central counterparties* tercantum pada bagian XI of standar yang mengatur *counterparty credit risk standards*.

A. Eksposur Individu

Persyaratan Uji Tuntas (*Due Diligence*)

3. Bank harus melakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa bank mempunyai pemahaman yang memadai terhadap profil risiko dan karakteristik dari *counterparty*-nya pada saat awal transaksi dan selanjutnya dilakukan secara berkala (minimal setahun sekali). Apabila bank menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, *due diligence* perlu dilakukan untuk menilai risiko dari eksposur tersebut dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian⁵. Kedalaman *due diligence* dilakukan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Bank harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dan memadai dalam menilai tren, kinerja operasional dan kinerja keuangan melalui analisis kredit baik secara internal dan/atau melalui pihak ketiga, untuk setiap *counterparty*. Bank harus dapat mengakses informasi tentang *counterparty* secara berkala untuk melengkapi analisis *due diligence*.

⁵ Persyaratan *due diligence* tidak diwajibkan bagi eksposur sesuai paragraf 6 sampai dengan 11.

4. Untuk eksposur bagi entitas terkonsolidasi, *due diligence* harus dilakukan sampai pada tingkat entitas individu yang memiliki eksposur kredit, sepanjang dimungkinkan. Dalam mengevaluasi entitas individu, Bank perlu memperhitungkan dukungan maupun potensi permasalahan dari kelompok usaha yang dapat mempengaruhi *repayment capacity* dari entitas individu.
5. Bank harus mempunyai kebijakan, proses, sistem dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kesesuaian bobot risiko *counterparty*. Bank harus dapat menunjukkan kepada OJK bahwa analisis *due diligence* yang dilakukan sudah memadai.

1. Eksposur kepada Pemerintah

(tidak ada perubahan dari SEOJK mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar)

6. Bobot risiko eksposur kepada pemerintah dan bank sentral ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1 - Bobot risiko eksposur kepada pemerintah dan bank sentral

Jenis eksposur	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Eksposur Kepada Pemerintah	0%	20%	50%	100%	150%	100%

7. Sesuai dengan diskresi nasional, bobot risiko yang lebih rendah dapat diterapkan pada eksposur kepada pemerintah (atau bank sentral) dalam denominasi dan didanai⁶ dalam mata uang domestik.⁷ Apabila hal ini diterapkan, otoritas negara lain juga dapat mengizinkan bank yang diawasi untuk menerapkan bobot risiko yang sama terhadap eksposur pemerintah (atau bank sentral) dalam denominasi dan didanai oleh mata uang tersebut.

⁶ Ini berarti bank mempunyai kewajiban dalam denominasi mata uang domestik.

⁷ Bobot risiko yang lebih rendah ini juga berlaku bagi bobot risiko agunan dan jaminan sesuai kerangka Mitigasi Risiko Kredit.

8. Untuk bobot risiko eksposur kepada pemerintah, OJK dapat mengakui peringkat negara (*country risk*) yang ditetapkan *Export Credit Agencies* (ECAs). Untuk hal tersebut, ECA harus mempublikasikan peringkat risiko dan mengikuti metodologi yang sudah disepakati oleh OECD. Bank dapat memilih untuk menggunakan peringkat risiko yang dipublikasikan oleh ECA yang diakui oleh OJK atau peringkat yang sudah disepakati bersama oleh ECA yang berpartisipasi pada "*Arrangement on Officially Supported Export Credits*".⁸ Metodologi yang telah disepakati OECD terdiri dari delapan peringkat yang dikaitkan dengan minimum *export insurance premiums*. Peringkat ECA ini sesuai dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dibawah ini.

⁸ Klasifikasi Risiko Negara (*country risk*) yang disepakati terdapat pada situs OECD (www.oecd.org) pada bagian *Trade Directorate* dalam *Export Credit Arrangement*.

Tabel 2 - Bobot risiko eksposur kepada pemerintah dan bank sentral

Peringkat risiko	0 s.d. 1	2	3	4 s.d. 6	7
Bobot risiko	0%	20%	50%	100%	150%

9. Bobot risiko untuk Eksposur kepada *Bank for International Settlements, International Monetary Fund, European Central Bank, European Union, European Stability Mechanism (ESM)* dan *European Financial Stability Facility (EFSF)* ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

2. Eksposur kepada Entitas Sektor Publik

(tidak ada perubahan dari SEOJK mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar)

10. Bobot risiko eksposur kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai diskresi nasional, dengan mengacu pada salah satu dari Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.

Tabel 3 - Opsi 1: Berdasarkan peringkat eksternal eksposur kepada pemerintah

Peringkat eksternal kepada pemerintah	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Tabel 4 - Opsi 2: Berdasarkan peringkat eksternal eksposur kepada Entitas Sektor Publik

Peringkat eksternal eksposur kepada Entitas Sektor Publik	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

11. Sesuai diskresi nasional, bobot risiko eksposur kepada Entitas Sektor Publik⁹ dapat disamakan dengan bobot risiko eksposur kepada pemerintah tempat Entitas Sektor Publik tersebut didirikan. Apabila diskresi ini diterapkan, otoritas negara lain dapat memperbolehkan bank yang diawasi untuk menerapkan bobot risiko eksposur yang sama kepada Entitas Sektor Publik tersebut.

- ⁹ Contoh berikut ini memberikan gambaran bagaimana Entitas Sektor Publik dapat dikategorikan dengan melihat pada satu fitur spesifik, yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan (*revenue-raising powers*). Namun demikian, terdapat cara lain untuk menentukan perlakuan yang berbeda yang dapat diterapkan untuk jenis Entitas Sektor Publik yang berbeda, misalnya dengan melihat pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah pusat:
- Pemerintah regional dan otoritas lokal dapat diperlakukan sama dengan Pemerintah Pusat dan Bank Sentral jika Pemerintah regional dan Otoritas lokal dimaksud mempunyai *revenue-raising powers* dan pengaturan institusional yang bersifat spesifik untuk mengurangi risiko gagal bayar.
 - Badan administratif yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, pemerintah regional atau otoritas lokal dan entitas non komersial yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas lokal dapat **tidak** diperlakukan sama dengan eksposur terhadap Pemerintah Pusat dan Bank Sentral apabila entitas-entitas dimaksud tidak memiliki *revenue-raising powers* atau pengaturan lain sesuai yang dijelaskan di atas. Apabila pengaturan pemberian pinjaman yang ketat diterapkan untuk entitas-entitas dimaksud dan karena status publik khusus yang dimiliki tidak dimungkinkan untuk dinyatakan bangkrut, maka lebih tepat untuk memperlakukan eksposur tersebut sesuai dengan Opsi 1 atau Opsi 2 untuk Entitas Sektor Publik.
 - Entitas komersial yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah regional atau Otoritas lokal dapat diperlakukan sebagai perusahaan komersial. OJK dapat memutuskan untuk mempertimbangkan entitas tersebut sebagai korporasi dan menerapkan bobot risiko yang sesuai apabila entitas tersebut beroperasi selayaknya korporasi dalam pasar yang kompetitif meskipun Otoritas Pusat, Otoritas regional atau lokal merupakan pemegang saham utama dari entitas tersebut.

3. Eksposur kepada Bank Pembangunan Multilateral

12. Untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Bank (MDB)*) merupakan institusi yang dibentuk oleh sekelompok negara yang menyediakan pembiayaan dan bantuan profesional untuk proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Setiap MDB mempunyai status hukum dan operasional yang independen namun memiliki mandat sejenis dan beberapa pemilik yang signifikan.
13. Bobot risiko eksposur 0% dapat diterapkan untuk eksposur kepada MDB sesuai kriteria di bawah ¹⁰. BCBS akan terus mengevaluasi pemenuhan kriteria ini secara *case-by-case*. Kriteria untuk bobot risiko 0% dimaksud adalah sebagai berikut:
- (i) Peringkat debitur dengan kualitas sangat tinggi, yaitu mayoritas peringkat MDB harus AAA ¹¹;
 - (ii) Struktur pemegang saham didominasi oleh negara yang memiliki peringkat jangka panjang AA- atau lebih baik, atau mayoritas sumber pendanaan MDB berupa modal disetor dan MDB tersebut memiliki sedikit atau tidak memiliki *leverage*;
 - (iii) Dukungan yang kuat dari pemegang saham yang dibuktikan dengan jumlah modal disetor oleh pemegang saham; memiliki hak opsi meminta modal tambahan untuk melunasi kewajibannya, apabila diperlukan; dan adanya kontribusi modal dan komitmen baru secara berkelanjutan dari negara yang menjadi pemegang saham;

- (iv) Kecukupan permodalan dan likuiditas (pendekatan *case-by-case* diperlukan untuk menilai kecukupan permodalan dan likuiditas MDB); dan
- (v) Terdapat persyaratan penyaluran pinjaman yang ketat dan kebijakan keuangan yang konservatif, mencakup proses persetujuan yang terstruktur, penilaian kelayakan kredit internal dan batas risiko konsentrasi (per negara, sektor dan eksposur individu dan kategori kredit), persetujuan *large exposure* oleh pengurus atau komite yang dibentuk oleh pengurus, jadwal pelunasan yang tetap, pemantauan penggunaan kredit secara efektif, proses peninjauan status, dan penilaian risiko serta pencadangan kerugian yang ketat.

¹⁰ MDB yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bobot risiko 0% yaitu: *World Bank Group* yang terdiri atas *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *International Finance Corporation (IFC)*, *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* dan *International Development Association (IDA)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *African Development Bank (AfDB)*, *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*, *Inter-American Development Bank (IADB)*, *European Investment Bank (EIB)*, *European Investment Fund (EIF)*, *Nordic Investment Bank (NIB)*, *Caribbean Development Bank (CDB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *Council of Europe Development Bank (CEDB)*, *International Finance Facility for Immunization (IFFIm)*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.

¹¹ MDB yang mengajukan untuk ditambahkan pada daftar MDB yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bobot risiko 0% harus memenuhi kriteria peringkat AAA pada saat pengajuan. Setelah terdaftar sebagai MDB yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bobot risiko 0%, terdapat kemungkinan peringkat diturunkan, namun tidak dapat lebih rendah dari AA- dalam keadaan apapun. Jika tidak memenuhi persyaratan dimaksud, eksposur kepada MDB tersebut akan dikenakan perlakuan seperti pada paragraf 14.

14. Untuk eksposur kepada MDB lainnya, bank harus mengenakan bobot risiko eksposur kepada MDB lainnya sesuai Tabel 5.

Tabel 5 - Bobot risiko eksposur kepada MDB lainnya

Jenis Eksposur	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bank Pembangunan Multilateral	20%	30%	50%	100%	150%	50%

4. Eksposur kepada Bank

15. Untuk perhitungan KPMM, eksposur kepada bank didefinisikan sebagai eksposur (termasuk pinjaman dan instrumen utang dengan kategori senior, kecuali diperlakukan sebagai utang subordinasi sesuai paragraf 50) kepada lembaga keuangan yang diizinkan menghimpun dana dari masyarakat dan mematuhi standar prinsip kehati-hatian dan tingkat pengawasan yang berlaku. Perlakuan terkait utang subordinasi dan ekuitas terdapat pada paragraf 46 sampai 50.

Penetapan bobot risiko

16. Bobot risiko eksposur kepada bank ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (*External Credit Risk Assessment Approach* (ECRA)): pendekatan ini digunakan untuk bank yang berkedudukan di yurisdiksi yang memperbolehkan penggunaan peringkat eksternal. Ini diterapkan untuk eksposur kepada bank yang mempunyai peringkat. Paragraf 95 sampai 110 berisi kriteria peringkat yang bisa digunakan. Dalam hal ini, OJK memperbolehkan penggunaan peringkat eksternal.
- b. Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Standar (*Standardised Credit Risk Assessment Approach* (SCRA)): pendekatan ini digunakan untuk eksposur kepada bank yang berkedudukan di yurisdiksi yang **tidak** memperbolehkan penggunaan peringkat eksternal. **Untuk eksposur kepada bank yang tidak berperingkat, pendekatan ini juga digunakan bagi bank yang berkedudukan di yurisdiksi yang memperbolehkan penggunaan peringkat eksternal**, dalam hal ini di perbankan Indonesia.

(a) Pendekatan Peringkat Penilaian Risiko Kredit Eksternal (*External Credit Risk Assessment Approach* (ECRA))

17. Bank akan dikenakan bobot risiko sesuai Tabel 6 ¹². Peringkat tersebut tidak boleh mengasumsikan adanya dukungan pemerintah yang bersifat implisit (*implicit government support*), kecuali peringkat tersebut mengacu pada bank yang dimiliki oleh pemerintah ¹³. Bank hanya diperbolehkan menerapkan SCRA untuk eksposur kepada bank tanpa peringkat, sesuai dengan paragraf 20.

¹² Dari perspektif bank eksposur diberikan peringkat apabila dilakukan oleh “lembaga pemeringkat yang diakui” (*recognised eligible credit assessment institution-ECAI*) yang telah dipilih bank (yaitu bank telah menginformasikan kepada OJK mengenai rencana penggunaan peringkat dari ECAI tersebut secara konsisten (sesuai paragraf 97)). Dengan kata lain, apabila terdapat peringkat eksternal namun bukan berasal dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, atau peringkat yang diterbitkan oleh ECAI namun ECAI tersebut tidak dipilih oleh bank, eksposur diperlakukan sebagai eksposur tanpa peringkat dari perspektif bank.

¹³ Dukungan pemerintah secara implisit merupakan dukungan untuk mencegah kerugian kreditur apabila terjadi kegagalan pada bank. OJK dapat memperbolehkan bank untuk menggunakan peringkat eksternal yang menggunakan asumsi adanya dukungan pemerintah secara implisit sampai dengan lima tahun, sejak implementasi standar ini, ketika menerapkan bobot risiko “dasar” sesuai Tabel 6 untuk eksposur kepada bank.

Tabel 6
Bobot risiko eksposur kepada bank
Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (ECRA)

	Peringkat yang setara				
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-
Bobot risiko “dasar”	20%	30%	50%	100%	150%
Bobot risiko untuk eksposur jangka pendek	20%	20%	20%	50%	150%

18. Eksposur kepada bank dengan jatuh tempo sama dengan atau kurang dari tiga bulan (≤ 3 bulan), dan juga eksposur yang timbul dari pergerakan barang antar negara dengan jatuh tempo sama dengan atau kurang dari enam bulan (≤ 6 bulan)¹⁴, dikenakan bobot risiko yang sama dengan bobot risiko untuk eksposur jangka pendek pada Tabel 6.

¹⁴ mencakup eksposur *on-balance sheet* seperti pinjaman dan *off-balance sheet* seperti *self-liquidating trade-related contingent items*.

19. Bank harus melakukan *due diligence* untuk memastikan penggunaan peringkat eksternal yang menggambarkan kelayakan kredit dari *covered bond* dan bank penerbit secara memadai dan konservatif. Apabila analisis *due diligence* yang dilakukan menghasilkan karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat eksternal (misalnya AAA hingga AA-; A+ sampai A-; dst) maka bank harus menggunakan bobot risiko setidaknya satu *bucket* lebih tinggi dibandingkan bobot risiko “dasar” yang ditentukan oleh peringkat eksternal. Analisis *due diligence* yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penerapan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan peringkat eksternal.
20. SCRA juga diterapkan untuk eksposur kepada bank yang tidak berperingkat pada perbankan Indonesia. SCRA mewajibkan bank untuk mengklasifikasikan eksposur kepada bank menjadi tiga *bucket* (Grade A, B dan C) dan menerapkan bobot risiko sesuai Tabel 7. Untuk tujuan SCRA, “persyaratan modal minimum yang ditetapkan” pada paragraf 21 sampai 28 tidak termasuk standar likuiditas.

Tabel 7
Bobot risiko eksposur kepada bank
Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (ECRA)

	Grade A	Grade B	Grade C
Bobot risiko “dasar”	40% ¹⁵	75%	150%
Bobot risiko untuk eksposur jangka pendek	20%	50%	150%

¹⁵ Sesuai pendekatan SCRA, eksposur kepada bank tanpa peringkat kredit eksternal dapat dikenakan bobot risiko 30% dengan persyaratan bank *counterparty* memiliki CET1 ratio sama dengan atau lebih dari 14% dan Tier 1 *leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 5%. Bank *counterparty* juga harus memenuhi seluruh persyaratan klasifikasi Grade A.

Grade A

21. *Grade A*, merupakan eksposur kepada bank dimana bank *counterparty* mempunyai kapasitas memadai untuk memenuhi komitmen keuangan (termasuk pembayaran kembali pokok dan bunga) secara tepat waktu selama jangka waktu aset atau eksposur tanpa terpengaruh siklus ekonomi dan kondisi bisnis.

22. Bank *counterparty* yang diklasifikasikan sebagai *Grade A* paling tidak harus memenuhi persyaratan modal minimum dan *buffer* yang ditetapkan oleh OJK, kecuali untuk kebutuhan modal minimum atau *buffer* yang bersifat **spesifik** yang dapat diterapkan melalui tindakan pengawasan (sebagai contoh Pilar 2) dan tidak dipublikasikan. Apabila informasi persyaratan modal minimum dan *buffer* (selain dari persyaratan minimum atau *buffer* spesifik untuk bank) tidak dipublikasikan atau tidak disediakan oleh bank *counterparty* maka bank *counterparty* tersebut harus dinilai sebagai *Grade B* atau lebih rendah.
23. Apabila dalam proses *due diligence*, suatu bank *counterparty* tidak memenuhi definisi *Grade A* pada paragraf 21 dan 22, maka eksposur kepada bank *counterparty* harus diklasifikasikan sebagai *Grade B* atau *Grade C*.

Grade B

24. *Grade B* diterapkan untuk eksposur kepada bank, dimana bank *counterparty* memiliki risiko kredit yang signifikan, misalnya kemampuan membayar yang tergantung pada kondisi ekonomi dan bisnis yang stabil atau menguntungkan.
25. Bank *counterparty* yang diklasifikasikan sebagai *Grade B* paling tidak harus memenuhi persyaratan modal minimum (**tidak termasuk *buffer***) yang ditetapkan oleh OJK, kecuali untuk kebutuhan modal minimum atau *buffer* **spesifik** yang dapat diterapkan melalui tindakan pengawasan (sebagai contoh Pilar 2) dan tidak dipublikasikan. Apabila informasi persyaratan modal minimum tidak diungkapkan atau tidak disediakan oleh bank *counterparty* maka bank *counterparty* tersebut harus dinilai sebagai *Grade C*.
26. Bank harus mengklasifikasikan eksposur yang tidak memenuhi persyaratan pada paragraf 21 dan 22 sebagai *Grade B*, kecuali untuk eksposur yang diklasifikasikan sebagai *Grade C* sesuai paragraf 27 dan 28.

Grade C

27. *Grade C* merupakan eksposur kepada bank dengan risiko kredit yang lebih tinggi, dimana bank *counterparty* mempunyai risiko gagal bayar dan kemampuan permodalan yang terbatas. Untuk bank *counterparty* tersebut, kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi yang memburuk kemungkinan besar akan mengakibatkan bank *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

28. Apabila terdapat salah satu kondisi di bawah ini maka Bank harus mengklasifikasikan eksposur menjadi *Grade C* :

- Bank *counterparty* tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai *Grade B* sesuai persyaratan modal minimum yang tercantum pada paragraf 24 dan 25; atau
- Dalam hal terdapat persyaratan laporan keuangan yang telah diaudit, auditor eksternal telah menerbitkan opini audit yang tidak wajar (*adverse*) atau meragukan kemampuan bank *counterparty* untuk melanjutkan usahanya (*going concern*) pada laporan keuangan atau laporan audit selama 12 bulan terakhir.

Meskipun salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, bank dapat menilai bank *counterparty* memenuhi definisi eksposur sesuai paragraf 27. Dalam hal ini, eksposur untuk bank *counterparty* harus diklasifikasikan sebagai *Grade C*.

29. Bobot risiko untuk eksposur kepada bank dengan jatuh tempo ≤ 3 bulan, dan eksposur kepada bank yang timbul dari pergerakan barang antar negara dengan jatuh tempo ≤ 6 bulan¹⁶, dikenakan bobot risiko eksposur jangka pendek sesuai tabel 7.

¹⁶ Mencakup eksposur *on-balance sheet* seperti pinjaman dan *off-balance sheet* seperti *self-liquidating trade-related contingent items*.

30. Untuk menggambarkan adanya risiko transfer dan *convertibility* pada SCRA, terdapat batas minimum bobot risiko (*risk weight floor*) untuk eksposur bank yaitu bobot risiko untuk eksposur kepada pemerintah di mana bank *counterparty* berkedudukan.

risk weight floor tersebut berlaku apabila :

- (i) eksposur tidak dalam denominasi mata uang lokal dari yurisdiksi tempat bank *counterparty* berkedudukan; dan
- (ii) untuk pinjaman yang dicatat pada kantor cabang dari bank *counterparty* di yurisdiksi asing (di luar kedudukan bank *counterparty*) dimana eksposur pinjaman tersebut bukan dalam denominasi mata uang lokal tempat kantor cabang beroperasi.

Bobot risiko minimum tersebut tidak berlaku untuk item kontijensi jangka pendek (dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun) yang bersifat *self-liquidating*, dan terkait dengan perdagangan yang timbul dari pergerakan barang¹⁷.

¹⁷ Dokumen BCBS terkait *Treatment of trade finance under the Basel capital framework* (Oktober 2011) terdapat pada <http://www.bis.org/publ/bcbs205.pdf>.

5. Eksposur dalam bentuk *covered bond*

31. *Covered bond* merupakan obligasi yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pinjaman perumahan yang tunduk pada hukum untuk pengawasan publik yang didesain untuk melindungi pemegang obligasi. Dana yang dihasilkan dari penerbitan obligasi tersebut harus diinvestasikan ke dalam aset yang sesuai dengan hukum dimana:

- (i) selama jangka waktu obligasi, mampu membayar eksposur yang melekat pada obligasi, dan
- (ii) dalam hal terjadi kondisi gagal bayar pada penerbit, akan diprioritaskan untuk pembayaran pokok dan bunga yang masih terutang.

Aset-aset yang Memenuhi Kriteria

32. Agar memenuhi kriteria untuk pengenaan bobot risiko sebagaimana paragraf 34, aset yang mendasari (*cover pool*) dari *covered bonds* sebagaimana didefinisikan pada paragraf 31 harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada paragraf 33 dan harus merupakan:
- tagihan kepada pemerintah, bank sentral, entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral, atau tagihan yang digaransi oleh pemerintah, bank sentral, entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral; atau
 - tagihan yang dijamin oleh properti residensial yang memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 57 dengan rasio *loan-to-value* (LTV) $\leq 80\%$; atau
 - tagihan yang dijamin oleh properti komersial yang memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 57 dengan rasio *loan-to-value* (LTV) $\leq 60\%$; atau
 - tagihan kepada bank yang memenuhi kualifikasi bobot risiko $\leq 30\%$ atau tagihan yang digaransi oleh bank yang memenuhi kualifikasi bobot risiko $\leq 30\%$. Namun nilai tagihan tersebut tidak melebihi 15% dari nilai penerbitan *covered bond*.

Nilai kumpulan aset (*pool of assets*) yang ditetapkan untuk instrumen *covered bond* harus sekurang-kurangnya sebesar 10% di atas nilai *outstandingnya*. Nilai *pool of assets* untuk tujuan ini tidak harus sesuai dengan yang dipersyaratkan secara hukum. Namun apabila persyaratan hukum tidak mengatur batasan sekurang-kurangnya sebesar 10% maka bank penerbit harus mempublikasikan secara berkala bahwa *cover pool* telah memenuhi persyaratan 10% dimaksud. Sebagai tambahan terhadap aset utama yang tercantum pada paragraf ini, agunan tambahan dapat termasuk aset pengganti (kas atau aset likuid jangka pendek yang dimiliki sebagai pengganti aset utama untuk menambahkan *cover pool*) dan derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko yang timbul dari program *covered bond*.

Persyaratan ini harus dipenuhi saat penerbitan *covered bonds* dan selama masa berlaku hingga jatuh tempo.

Persyaratan pengungkapan

33. Eksposur dalam bentuk *covered bond* dapat dikenakan bobot risiko sesuai paragraf 34 apabila bank yang berinvestasi pada *covered bond* tersebut dapat menunjukkan kepada OJK bahwa:

- a) Bank menerima informasi portofolio sekurang-kurangnya:
- i) nilai dari *cover pool* dan *covered bonds* yang beredar;
 - ii) distribusi geografis dan jenis *cover assets*, jumlah pinjaman, risiko suku bunga dan risiko mata uang;
 - iii) struktur jatuh tempo dari *cover assets* dan *covered bonds*; dan
 - iv) persentase pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari.
- b) Penerbit membuat informasi sebagaimana dimaksud pada poin a) kepada bank sekurang-kurangnya setiap semester.
34. *Covered bond* yang memenuhi kriteria yang tercantum pada paragraf 32 dan 33 dikenakan bobot risiko berdasarkan peringkat spesifik penerbitan (*issue-specific rating*) atau bobot risiko penerbit berdasarkan persyaratan yang tercantum pada paragraf 95 sampai 110. Untuk *covered bonds* berdasarkan peringkat spesifik penerbitan¹⁸, bobot risiko yang dikenakan mengacu pada Tabel 8. Untuk *covered bonds* tanpa peringkat, bobot risiko yang dikenakan mengacu pada bobot risiko ECRA atau SCRA penerbit sesuai Tabel 9.

¹⁸ Dari perspektif bank eksposur diberikan peringkat apabila dilakukan oleh “lembaga pemeringkat yang diakui” (*recognised eligible credit assessment institution-ECAI*) yang telah dipilih bank (yaitu bank telah menginformasikan kepada OJK mengenai rencana penggunaan peringkat dari ECAI tersebut secara konsisten (sesuai paragraf 101)). Dengan kata lain, apabila terdapat peringkat eksternal namun bukan berasal dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, atau peringkat yang diterbitkan oleh ECAI namun ECAI tersebut tidak dipilih oleh bank, eksposur diperlakukan sebagai eksposur tanpa peringkat dari perspektif bank.

Tabel 8 - Bobot risiko eksposur *covered bond* sesuai peringkat

<i>Issue-specific rating</i>	Peringkat yang setara				
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-
Bobot risiko “dasar”	10%	20%	20%	50%	100%

Tabel 9 - Bobot risiko eksposur *covered bond* tanpa peringkat

Bobot risiko bank penerbit	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%
Bobot risiko “dasar”	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%

35. Bank harus melakukan *due diligence* untuk memastikan penggunaan peringkat eksternal yang menggambarkan kelayakan kredit dari *covered bond* dan bank penerbit secara memadai dan konservatif. Apabila analisis *due diligence* yang dilakukan menghasilkan karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat eksternal (misalnya AAA hingga AA-; A+ sampai A-; dst) maka bank harus menggunakan bobot risiko setidaknya satu *bucket* lebih tinggi dibandingkan bobot risiko “dasar” yang ditentukan oleh peringkat eksternal. Analisis *due diligence* yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penerapan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan peringkat eksternal.

6. Eksposur kepada perusahaan efek sekuritas dan lembaga keuangan lainnya

36. Eksposur kepada perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya dapat diperlakukan sebagai eksposur kepada bank jika perusahaan tersebut tunduk pada pengaturan dan pengawasan yang berlaku ekuivalen dengan yang diterapkan kepada bank (termasuk persyaratan permodalan dan likuiditas). OJK menentukan apakah kerangka pengaturan dan pengawasan yang mengatur perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya ekuivalen dengan kerangka pengaturan dan pengawasan yang mengatur bagi bank.

Apabila kerangka pengaturan dan pengawasan perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya tersebut ekuivalen dengan kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap bank pada suatu yurisdiksi, maka otoritas di yurisdiksi lain dapat memperbolehkan bank yang diawasinya untuk menetapkan bobot risiko kepada perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya sama dengan bobot risiko eksposur kepada bank. Eksposur kepada perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya selain di atas akan dikenakan bobot risiko eksposur kepada korporasi.

7. Eksposur kepada korporasi

37. Eksposur kepada korporasi termasuk eksposur (pinjaman, obligasi, piutang, dll) kepada perusahaan, asosiasi, kemitraan, perusahaan perseorangan, perserikatan, *funds* (misal *hedge funds*, *managed funds*, *investment funds*), dan entitas lain dengan karakteristik serupa, kecuali yang memenuhi syarat untuk dikategorikan ke dalam jenis eksposur lainnya. Eksposur kepada korporasi termasuk, eksposur kepada perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan lainnya yang tidak memenuhi definisi eksposur kepada bank, atau perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 dan 36. Eksposur kepada korporasi tidak termasuk eksposur kepada perseorangan.

Eksposur kepada korporasi dapat dibagi menjadi subkategori sebagai berikut:

- (i) Eksposur kepada korporasi umum;
- (ii) Eksposur dalam bentuk *specialised lending* sesuai paragraf 41.

7.1 Eksposur kepada korporasi umum

Penentuan bobot risiko

38. Untuk eksposur kepada korporasi, bank akan menetapkan bobot risiko “dasar” sesuai Tabel 10.¹⁹ Bank harus menerapkan *due diligence* untuk memastikan penggunaan peringkat eksternal yang sesuai dan mencerminkan kelayakan kredit dari *counterparty*. Bank yang menerapkan bobot risiko sesuai paragraf 17 harus menerapkan bobot risiko untuk eksposur kepada korporasi sesuai Tabel 10.

Apabila analisis *due diligence* yang dilakukan menghasilkan karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat eksternal (misalnya AAA hingga AA-; A+ sampai A-; dst) maka bank harus menggunakan bobot risiko setidaknya satu *bucket* lebih tinggi dibandingkan bobot risiko “dasar” yang ditentukan oleh peringkat eksternal. Analisis *due diligence* yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penerapan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan peringkat eksternal.

- ¹⁹ Dari perspektif bank eksposur diberikan peringkat apabila dilakukan oleh “lembaga pemeringkat yang diakui” (*recognised eligible credit assessment institution*-ECAI) yang telah dipilih bank (yaitu bank telah menginformasikan kepada OJK mengenai rencana penggunaan peringkat dari ECAI tersebut secara konsisten (sesuai paragraf 97)). Dengan kata lain, apabila terdapat peringkat eksternal namun bukan berasal dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, atau peringkat yang diterbitkan oleh ECAI namun ECAI tersebut tidak dipilih oleh bank, eksposur diperlakukan sebagai eksposur tanpa peringkat dari perspektif bank.
39. Eksposur kepada korporasi tanpa peringkat, akan dikenakan bobot risiko 100%, kecuali untuk eksposur kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil tanpa peringkat sebagaimana dijelaskan pada paragraf 40.

Tabel 10 - Bobot Risiko Eksposur Kepada Korporasi

Jenis Eksposur	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat
	AAA s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d B-	Kurang dari B-	
Bobot risiko “dasar”	20%	50%	75%	100%	150%	100%

40. Bobot risiko untuk eksposur kepada korporasi Usaha Mikro dan Kecil (*SME*) tanpa peringkat (yaitu eksposur kepada korporasi dengan nilai penjualan \leq €50 juta secara terkonsolidasi untuk beberapa tahun terakhir) adalah sebesar 85%. Bobot risiko kepada Usaha Mikro dan Kecil yang sesuai paragraf 52 akan diperlakukan sebagai Eksposur kepada ritel Usaha Mikro dan Kecil dengan nilai 75%.

7.2 *Specialised lending*

41. Eksposur kepada korporasi akan diperlakukan sebagai eksposur *specialised lending* jika memiliki karakteristik, baik secara bentuk hukum maupun substansi ekonomi, sebagai berikut:
- Eksposur tidak terkait dengan properti dan mencakup pembiayaan objek (*object finance*), pembiayaan proyek (*project finance*) atau pembiayaan komoditas (*commodities finance*) sesuai paragraf 42. Eksposur terkait dengan properti akan diperlakukan sesuai dengan paragraf 56 sampai 72.
 - Umumnya, pinjaman diberikan kepada suatu entitas yang dibentuk secara khusus (*special purpose vehicle* (SPV)) untuk membiayai dan/atau mengoperasikan aset fisik
 - Entitas peminjam tidak memiliki atau hanya memiliki beberapa aset atau aktivitas material lainnya, sehingga tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kapasitas membayar kewajiban secara independen, selain dari pendapatan yang berasal dari aset yang sedang dibiayai. Sumber utama pembayaran kewajiban adalah pendapatan yang dihasilkan dari aset, dan bukan berasal dari kapasitas entitas peminjam secara independen.
 - Jangka waktu obligasi memungkinkan pemberi pinjaman mempunyai kontrol terhadap aset dan pendapatan yang dihasilkan.

42. Eksposur yang dijelaskan pada paragraf 41 akan diklasifikasikan dalam salah satu dari tiga jenis pembiayaan berikut:
- (i) **Pembiayaan proyek (*Project Finance*)**
Merupakan metode pembiayaan dimana pemberi pinjaman mempunyai ekspektasi bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh proyek menjadi sumber pembayaran dan jaminan atas pinjaman. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk proyek pembangunan yang besar, kompleks dan berbiaya tinggi seperti pembangkit energi, pabrik pengolahan kimia, pertambangan, infrastruktur transportasi, lingkungan, media, dan telekomunikasi. Pembiayaan proyek dapat berupa pembiayaan pembangunan instalasi baru, atau pembiayaan kembali (*refinancing*) terhadap instalasi yang sudah ada, dengan atau tanpa adanya renovasi.
 - (ii) **Pembiayaan Objek (*Object Finance*)**
Merupakan pembiayaan untuk mengakuisisi peralatan (misalnya kapal laut, pesawat terbang, satelit, kereta rel) di mana pembayaran pinjaman tergantung pada arus kas yang dihasilkan oleh aset spesifik yang telah dibiayai dan dijamin kepada pemberi pinjaman.
 - (iii) **Pembiayaan komoditas (*Commodities Finance*)**
Merupakan metode pembiayaan jangka pendek untuk membiayai cadangan, persediaan, atau piutang dari komoditas yang diperdagangkan (misalnya minyak mentah, logam, atau hasil pertanian) di mana pinjaman akan dilunasi dari hasil penjualan komoditas dan debitur tidak memiliki kapasitas lain untuk membayar utang.
43. Bank menetapkan bobot risiko untuk *specialised lending* berdasarkan *issue-specific external ratings* jika rating tersebut tersedia, mengacu pada Bobot Risiko Eksposur Kepada Korporasi (Tabel 10). Penggunaan peringkat penerbit tidak diperbolehkan (Paragraf 101 tidak berlaku untuk eksposur *specialised lending*).
44. Untuk eksposur *specialised lending* di mana tidak tersedia *issue-specific external rating* maka berlaku perlakuan bobot risiko sebagai berikut:
- *Object Finance* dan *Commodities Finance* dikenakan bobot risiko 100%
 - Eksposur *Project Finance* akan dikenakan bobot risiko 130% selama fase pra-operasional dan 100% selama fase operasional. Eksposur pembiayaan proyek yang berkualitas tinggi selama fase operasional, sebagaimana paragraf 45, dikenakan bobot sebesar 80%. Fase operasional didefinisikan sebagai fase di mana entitas yang secara khusus dibentuk untuk membiayai proyek yang memiliki (i) arus kas bersih positif yang cukup untuk menutupi kewajiban kontraktual yang tersisa, dan (ii) penurunan utang jangka panjang.

45. Eksposur *Project Finance* dengan kualitas tinggi adalah eksposur pembiayaan proyek yang mempunyai kapasitas yang memadai untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu dan dinilai tetap memadai meskipun siklus ekonomi dan kondisi bisnis memburuk.

Adapun kriteria *Project Finance* yang berkualitas tinggi adalah sebagai berikut:

- Entitas *Project Finance* tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan kreditur (misalnya tidak diperbolehkan menambah utang tanpa persetujuan kreditur);
- Entitas *Project Finance* mempunyai dana cadangan atau kontrak keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan kebutuhan modal kerja proyek yang bersifat kontigensi;
- *Availability-based revenues*²⁰ atau pendapatan yang bergantung pada peraturan *rate-of-return* atau kontrak *take-or-pay*;
- Pendapatan entitas *Project Finance* bergantung pada satu *counterparty* utama yang merupakan pemerintah pusat, Entitas Sektor Publik atau entitas korporasi dengan bobot risiko $\leq 80\%$;
- Ketentuan kontrak yang mengatur eksposur kepada entitas *Project Finance* memberikan kepastian perlindungan kepada kreditur apabila terjadi gagal bayar dari entitas *Project Finance*;
- *Counterparty* utama atau *counterparty* lain yang sesuai kriteria *counterparty* utama akan melindungi kreditur dari kerugian akibat penghentian proyek;
- Semua aset dan kontrak yang diperlukan untuk operasional proyek telah dijamin kepada kreditur sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kreditur dapat mengambil kendali entitas *Project Finance* dalam hal terjadi gagal bayar.

²⁰ *Availability-based revenues* berarti apabila konstruksi telah selesai, entitas *project finance* berhak mendapatkan pembayaran dari *counterparty* kontraktual (misalnya pemerintah), selama persyaratan kontrak tersebut terpenuhi. Besar ketersediaan pembayaran disesuaikan dengan memperhitungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan, *debt service cost* dan *equity returns* ketika entitas pembiayaan proyek mengoperasikan proyek dimaksud. Ketersediaan pembayaran tidak tergantung pada perubahan dari permintaan di pasar dan umumnya disesuaikan hanya ketika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi yang diperjanjikan.

8. Utang subordinasi, ekuitas dan instrumen modal lainnya

46. Perlakuan yang dijelaskan dalam paragraf 47 hingga 50 berlaku untuk instrumen utang subordinasi, ekuitas dan instrumen permodalan lainnya yang diterbitkan oleh korporasi atau bank, dengan syarat bahwa instrumen tersebut tidak dikurangkan dari modal dalam KPMM atau dikenakan bobot risiko sebesar 250%. Eksposur ekuitas didefinisikan atas dasar substansi ekonomi dari instrumen, mencakup kepentingan kepemilikan langsung dan tidak langsung²¹, terlepas dari ada atau tidaknya kepemilikan hak suara, dalam aset dan pendapatan dari perusahaan komersial atau dari lembaga keuangan yang tidak dikonsolidasikan atau dikurangkan dalam perhitungan KPMM. Instrumen akan diperhitungkan sebagai eksposur ekuitas apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- Pengembalian dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan (*irredeemable*) dan hanya dapat diperoleh dengan cara penjualan investasi atau penjualan hak atas investasi atau dengan likuidasi penerbit;

- Tidak menimbulkan kewajiban bagi penerbit; dan
- Merupakan klaim residual atas aset atau pendapatan dari penerbit.

Selain itu, salah satu dari instrumen berikut ini harus dikategorikan sebagai eksposur ekuitas:

- Instrumen dengan struktur yang sama seperti instrumen yang diperbolehkan sebagai modal inti (*Tier 1 capital*) untuk bank.
- Instrumen yang menimbulkan kewajiban bagi penerbit dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - 1) Penerbit dapat menunda penyelesaian kewajiban tanpa batas waktu;
 - 2) Adanya persyaratan (atau diperbolehkan dengan diskresi penerbit) untuk menyelesaikan kewajiban dengan menerbitkan saham penerbit dalam jumlah yang tetap;
 - 3) Adanya persyaratan (atau diperbolehkan dengan diskresi penerbit) untuk menyelesaikan kewajiban dengan menerbitkan saham penerbit dalam jumlah yang variabel dimana setiap perubahan nilai kewajiban dapat dikaitkan dan diperbandingkan, serta searah, dengan perubahan nilai dari saham penerbit dengan jumlah yang tetap²² (*ceteris paribus*); atau,
 - 4) Pemilik instrumen memiliki opsi untuk mewajibkan agar kewajiban diselesaikan dalam bentuk saham, **kecuali** jika (i) untuk instrumen yang diperdagangkan, OJK meyakini bahwa bank telah menunjukkan instrumen tersebut diperdagangkan sebagai utang, atau (ii) untuk instrumen yang tidak diperdagangkan, OJK meyakini bahwa bank telah menunjukkan instrumen tersebut harus diperlakukan sebagai utang. Dalam kasus (i) dan (ii), bank dapat menjabarkan risiko untuk tujuan pemenuhan ketentuan, dengan persetujuan dari OJK.

Kewajiban utang dan surat berharga lainnya, kemitraan, derivatif atau struktur lain dengan intensi menimbulkan kepemilikan ekuitas akan diperhitungkan sebagai kepemilikan ekuitas²³, termasuk kewajiban dimana imbal hasil dikaitkan dengan ekuitas²⁴. Sebaliknya, investasi ekuitas dengan intensi menimbulkan kepemilikan utang atau eksposur sekuritisasi tidak boleh diperhitungkan sebagai kepemilikan ekuitas²⁵.

²¹ Kepemilikan ekuitas secara tidak langsung termasuk kepemilikan instrumen derivatif yang terkait dengan kepemilikan ekuitas, dan kepemilikan dalam korporasi, kemitraan, perseroan terbatas atau jenis usaha lain yang menerbitkan instrumen kepemilikan dan melakukan bisnis investasi dalam instrumen ekuitas.

²² Untuk kewajiban tertentu yang mensyaratkan atau memperbolehkan setelmen dengan penerbitan saham oleh penerbit dalam jumlah yang variabel, perubahan nilai kewajiban sama dengan perubahan nilai wajar dari saham dengan jumlah yang tetap dikalikan dengan faktor tertentu. Kewajiban tersebut memenuhi ketentuan butir 3 pada paragraf ini jika faktor dan jumlah saham yang menjadi acuan adalah tetap. Sebagai contoh, penerbit dipersyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menerbitkan saham dengan nilai yang sama dengan tiga kali dari apresiasi nilai wajar dari 1.000 lembar saham. Kewajiban itu dianggap sama dengan kewajiban yang mengharuskan setelmen dengan nilai penerbitan saham yang sama dengan apresiasi nilai wajar dari 3.000 lembar saham.

²³ Ekuitas yang dicatat sebagai pinjaman namun berasal dari pertukaran utang/ekuitas (*debt/equity swap*) yang dibuat sebagai bagian dari realisasi atau restrukturisasi utang termasuk dalam definisi kepemilikan ekuitas. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dikenakan beban modal yang lebih

- rendah dibandingkan dengan apabila kepemilikan instrumen tersebut tetap dimasukkan dalam portofolio utang.
- ²⁴ OJK dapat memutuskan untuk tidak menggolongkan kewajiban tersebut sebagai kewajiban dimana imbal hasil dikaitkan dengan ekuitas apabila dilakukan lindung nilai secara langsung dengan kepemilikan ekuitas, sehingga posisi bersih tidak menimbulkan risiko yang material.
- ²⁵ OJK memiliki diskresi untuk melakukan karakteristik ulang kepemilikan utang sebagai ekuitas dan jika tidak, OJK harus memastikan perlakuan yang tepat terhadap kepemilikan instrumen dalam pendekatan Pilar 2.
47. Bank harus menetapkan bobot risiko 400% untuk eksposur ekuitas bersifat spekulatif (*speculative unlisted equity exposures*) yang tidak tercatat di bursa sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 49 dan bobot risiko 250% untuk seluruh kepemilikan ekuitas lainnya, dengan pengecualian kepemilikan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 52 ²⁶.
- ²⁶ Perlakuan bobot risiko yang dijelaskan dalam paragraf 47 (tidak termasuk kepemilikan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 52) akan diterapkan secara bertahap selama lima tahun sejak tanggal penerapan standar ini. Untuk eksposur ekuitas spekulatif yang tidak tercatat di bursa, bobot risiko yang berlaku akan dimulai dari 100% dan meningkat 60 persen pada setiap akhir tahun hingga akhir tahun kelima. Untuk seluruh kepemilikan ekuitas lainnya, bobot risiko yang berlaku akan dimulai dari 100% dan meningkat 30 persen pada setiap akhir tahun hingga akhir tahun kelima.
48. *Speculative unlisted equity exposures* didefinisikan sebagai investasi ekuitas pada perusahaan yang tidak tercatat di bursa yang diinvestasikan dan dijual kembali dalam jangka pendek atau dinilai sebagai modal ventura atau investasi sejenis yang dipengaruhi volatilitas harga dan diperoleh untuk tujuan mendapatkan *capital gain* yang signifikan di masa depan ²⁷.
- ²⁷ Investasi dalam ekuitas pada perusahaan yang tidak tercatat di bursa di mana bank memiliki atau bermaksud untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang dan *debt-equity swaps* untuk tujuan restrukturisasi perusahaan akan dikecualikan dari kategori ini.
49. OJK dapat mengizinkan bank untuk menetapkan bobot risiko 100% untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang dilakukan sesuai dengan program perundang-undangan nasional yang memberikan subsidi signifikan terhadap investasi yang dilakukan oleh bank dan melibatkan pengawasan pemerintah dan pembatasan terhadap investasi tersebut. Perlakuan tersebut hanya dapat diberikan kepada investasi dalam instrumen ekuitas hingga 10% secara agregat dari penjumlahan modal *Tier 1* dan *Tier 2* bank. Contoh pembatasan yang dimaksud adalah batasan pada ukuran dan jenis bisnis dimana bank berinvestasi, jumlah kepemilikan yang diperbolehkan, lokasi geografis dan faktor terkait lainnya yang membatasi potensi risiko investasi pada bank.
50. Bank harus menetapkan bobot risiko sebesar 150% pada utang subordinasi dan instrumen modal selain saham. Setiap kewajiban yang memenuhi definisi "kewajiban TLAC lainnya" sesuai dokumen amandemen Basel III yang ditetapkan dalam standar *TLAC holdings* (Oktober 2016) paragraf 66b dan 66c dan yang tidak dikurangkan dari perhitungan KPMM dikategorikan sebagai utang subordinasi.

9. Eksposur Ritel

51. Eksposur ritel adalah eksposur kepada perorangan atau kelompok perorangan, atau kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil²⁸. Pengaturan untuk eksposur ritel yang dijamin oleh properti terdapat pada paragraf 56 sampai 72. Seluruh eksposur ritel lainnya akan diperlakukan sesuai paragraf 52 sampai 55.

²⁸ Usaha Mikro dan Usaha Kecil didefinisikan sesuai dengan paragraf 40, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf 52.

52. Eksposur ritel yang memenuhi seluruh kriteria yang tercantum di bawah ini akan diklasifikasikan sebagai “eksposur ritel” dan dikenakan bobot risiko sebesar 75%.

Eksposur ritel yang telah jatuh tempo **harus dikecualikan** dari keseluruhan portofolio eksposur ritel ketika melakukan penilaian kriteria perincian (*granularity*) di bawah ini.

- Kriteria produk: antara lain kredit yang dapat diperpanjang (*revolving credits*) dan fasilitas kredit (termasuk kartu kredit, kartu tagihan (*charge cards*) dan cerukan (*overdraft*), pinjaman konsumtif (misalnya kredit kendaraan bermotor dan pinjaman untuk keperluan pendidikan) dan fasilitas untuk usaha kecil dan komitmen. Pinjaman hipotek (*mortgage loans*), derivatif dan surat berharga lainnya (seperti obligasi dan saham), baik yang tercatat atau tidak, **dikecualikan dari kategori ini**.
- Nilai yang rendah dari eksposur individu : nilai agregat eksposur kepada satu *counterparty* tidak boleh melebihi dari batas absolut sebesar € 1 juta atau ekuivalen.
- Kriteria *granularity*: nilai agregat eksposur kepada satu *counterparty*²⁹ tidak boleh melebihi 0,2%³⁰ dari keseluruhan portofolio eksposur ritel sesuai ketentuan OJK, kecuali OJK telah menentukan metode lain untuk memastikan adanya diversifikasi yang mencukupi dari portofolio eksposur ritel.

²⁹ Nilai agregat eksposur merupakan jumlah bruto (yaitu tidak memperhitungkan adanya mitigasi risiko kredit) dari semua bentuk eksposur ritel, kecuali untuk eksposur kredit beragun properti residensial. Untuk tagihan rekening administratif, jumlah bruto dihitung setelah menerapkan faktor konversi kredit. Selain itu, "kepada satu *counterparty*" berarti satu atau beberapa entitas yang dapat dianggap sebagai satu penerima (misalnya untuk usaha kecil yang berafiliasi dengan usaha kecil lainnya, batas tersebut akan berlaku untuk agregat eksposur bank kepada kedua bisnis tersebut).

³⁰ Untuk menghindari perhitungan yang berulang, kriteria *granularity* hanya akan diverifikasi satu kali. Perhitungan harus dilakukan pada portofolio eksposur ritel yang memenuhi kriteria produk dan orientasi serta nilai eksposur yang rendah.

53. “Eksposur ritel” yang memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 52 yang berasal dari obligor yang memenuhi syarat sebagai *transactors* akan dikenakan bobot risiko sebesar 45%.

Transactors adalah obligor yang memiliki fasilitas seperti kartu kredit dan *charge cards* di mana tagihan dilunasi secara penuh pada setiap tanggal pembayaran yang terjadwal dalam 12 bulan terakhir. Obligor yang memiliki fasilitas cerukan (*overdraft*) juga diperhitungkan sebagai *transactors* apabila tidak ada penarikan dana selama 12 bulan terakhir.

54. “Eksposur ritel lainnya”: eksposur kepada perorangan atau kelompok perorangan yang tidak memenuhi seluruh kriteria dalam paragraf 52 dikenakan bobot risiko sebesar 100%.

55. Eksposur kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak memenuhi seluruh kriteria dalam paragraf 52 akan diperlakukan sebagai eksposur korporasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana paragraf 40, kecuali apabila dijamin oleh properti.

10. Eksposur Kredit Beragun Properti

56. Bobot risiko dalam Tabel 11, 12, 13 dan 14 dan pendekatan yang ditetapkan dalam paragraf 62 dan 68 akan berlaku apabila terdapat faktor struktural yang mengakibatkan kerugian kredit yang rendah dan stabil pada eksposur kredit beragun properti.

OJK harus mengevaluasi apakah bobot risiko dalam tabel-tabel dimaksud terlalu rendah untuk jenis eksposur ini berdasarkan pengalaman gagal bayar dan faktor lain seperti stabilitas harga pasar. Berdasarkan penilaiannya, OJK dapat mewajibkan bank untuk meningkatkan bobot risiko tersebut.

57. Untuk menerapkan bobot risiko dalam Tabel 11, 12, 13 dan 14 dan pendekatan yang ditetapkan dalam paragraf 62 dan 68, pinjaman harus memenuhi persyaratan berikut:

- Properti telah selesai dibangun: properti yang menjadi agunan eksposur harus sepenuhnya selesai dibangun. Persyaratan ini tidak berlaku untuk lahan hutan dan pertanian. OJK dapat menerapkan bobot risiko sebagaimana paragraf 61 dan 62 untuk kredit kepada individu yang dijamin dengan properti residensial yang sedang dalam proses pembangunan atau tanah yang akan dibangun rumah tinggal, dengan syarat:
 - (i) properti adalah unit perumahan dengan kapasitas maksimal 4 keluarga (*one-to four family*) yang akan menjadi tempat tinggal utama dari debitur dan pinjaman bukan merupakan pembiayaan secara tidak langsung terhadap perolehan lahan, pembangunan dan konstruksi yang dijelaskan dalam paragraf 71; atau
 - (ii) adanya keterlibatan pemerintah atau entitas sektor publik yang memiliki kekuatan hukum dan kemampuan untuk memastikan bahwa properti yang sedang dibangun akan selesai.
- Sah secara hukum: klaim terhadap properti harus berlaku sah secara hukum di seluruh yurisdiksi yang relevan. Perjanjian agunan dan proses hukum yang mendukungnya harus sedemikian rupa sehingga bank dapat merealisasikan nilai properti dalam waktu yang wajar.
- Klaim atas properti: pinjaman merupakan klaim atas properti dimana bank pemberi pinjaman memiliki hak tanggungan (*lien*) peringkat pertama atas properti, atau bank memiliki *lien* peringkat pertama dan *lien* peringkat lebih rendah yang berurutan (yaitu tidak ada *lien* bank lain diantara *lien-lien* bank tersebut) terhadap properti yang sama. Namun, apabila *lien* junior dapat dieksekusi secara hukum dan merupakan mitigasi risiko kredit yang efektif, *lien* junior dimaksud juga dapat diperhitungkan³¹. Untuk memenuhi persyaratan di atas, harus terdapat regulasi dimana: (i) setiap bank pemilik *lien* atas properti dapat menjual properti secara independen dari entitas lain yang juga memiliki *lien* atas properti tersebut; dan (ii) apabila penjualan properti tidak dilakukan melalui lelang secara publik, entitas pemilik *lien* senior mengambil langkah-langkah untuk memperoleh nilai pasar yang wajar atau harga terbaik yang dapat diperoleh apabila properti tersebut dimiliki sendiri oleh entitas dimaksud (entitas pemilik *lien* senior tidak diperbolehkan untuk menjual properti secara sepihak pada harga yang akan merugikan

entitas pemilik *lien junior*)³².

- Kemampuan debitur untuk membayar: debitur harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana paragraf 58.
- Nilai properti yang memenuhi prinsip kehati-hatian: properti harus dinilai sesuai dengan kriteria pada paragraf 59 untuk menentukan nilai rasio *loan to value* (LTV). Selain itu, nilai properti tidak harus bergantung secara material pada kinerja debitur.
- Dokumentasi yang diperlukan: seluruh informasi yang diperlukan saat pemberian kredit dan pemantauan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk informasi kemampuan membayar debitur dan valuasi properti.

³¹ Perlakuan yang sama juga akan diterapkan untuk *lien* dengan peringkat junior yang dimiliki bank yang juga memiliki *lien* dengan peringkat senior dalam hal terdapat *lien* yang peringkatnya berada diantaranya (*intermediate lien*) dari bank lain (yaitu *lien* senior dan junior yang dimiliki bank tidak dalam peringkat yang berurutan).

³² Dalam yurisdiksi tertentu, sebagian besar pinjaman bank untuk pembelian properti residensial tidak disediakan sebagai kredit pemilikan rumah dalam bentuk hukum. Melainkan pinjaman biasanya disediakan sebagai pinjaman yang dijamin oleh penjamin *monoline* (*monoline guarantor*) berperingkat tinggi yang akan melakukan pelunasan kepada bank secara penuh apabila debitur mengalami gagal bayar, dan dimana bank memiliki hak secara hukum untuk menjual properti apabila penjamin tersebut mengalami gagal bayar. Pinjaman tersebut dapat diperlakukan sebagai eksposur kredit beragun properti residensial (daripada sebagai kredit yang dijamin) apabila persyaratan tambahan berikut dipenuhi:

- (i) debitur secara kontraktual berkomitmen tidak menjaminkan kembali *lien* properti tanpa persetujuan dari bank yang memberikan pinjaman;
- (ii) penjamin adalah bank atau lembaga keuangan yang tunduk pada persyaratan permodalan sebagaimana pengaturan yang diterapkan pada bank atau perusahaan asuransi;
- (iii) penjamin membentuk dana penjaminan yang didanai secara penuh (*fully-funded mutual guarantee fund*) atau proteksi yang sejenis untuk perusahaan asuransi untuk menyerap kerugian risiko kredit, yang kalibrasinya harus diperiksa secara berkala oleh OJK dan perlu dilakukan *stress testing* secara berkala; dan
- (iv) bank secara kontraktual dan secara hukum diperbolehkan untuk mengeksekusi jaminan properti jika penjamin mengalami gagal bayar.

58. Kebijakan *underwriting* harus mendefinisikan metrik (seperti *debt service coverage ratio*) dan menetapkan tingkat relevansi metrik dimaksud dalam melakukan penilaian ³³. Kebijakan *underwriting* juga harus memadai ketika pembayaran kembali *mortgage loans* bergantung secara material pada arus kas yang dihasilkan oleh properti, termasuk metrik yang relevan (seperti tingkat hunian properti).

³³ Metrik dan tingkat untuk mengukur kemampuan membayar debitur harus mengacu pada dokumen *FSB Principles for sound residential mortgage underwriting practices* (April 2012).

59. Rasio LTV adalah jumlah pinjaman dibagi dengan nilai properti. Nilai properti akan ditetapkan berdasarkan nilai yang diukur saat pemberian kredit kecuali OJK meminta bank untuk merevisi nilai properti menjadi lebih rendah ³⁴. Nilai properti harus disesuaikan apabila terjadi kejadian luar biasa bersifat *idiosyncratic* yang menghasilkan penurunan nilai properti secara permanen. Modifikasi pada properti yang secara jelas meningkatkan

nilainya juga dapat dipertimbangkan dalam perhitungan LTV. Ketika menghitung rasio LTV, jumlah pinjaman akan berkurang seiring dengan adanya amortisasi.

Rasio LTV harus dihitung dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana persyaratan berikut:

- Jumlah pinjaman: termasuk jumlah baki debit pinjaman dan jumlah komitmen pinjaman yang belum ditarik pada kredit beragun properti ³⁵. Jumlah pinjaman harus dihitung secara bruto sebelum memperhitungkan provisi dan mitigasi risiko lainnya.
- Nilai properti: valuasi harus dinilai secara independen ³⁶ dengan menggunakan kriteria penilaian yang konservatif. Untuk memastikan bahwa nilai properti dinilai secara konservatif, valuasi harus mengecualikan ekspektasi kenaikan harga dan harus disesuaikan untuk memperhitungkan potensi harga pasar saat ini lebih besar secara signifikan dari nilai properti yang digunakan selama sisa jangka waktu pinjaman. Jika nilai pasar dapat ditentukan maka valuasi tidak boleh lebih tinggi dari nilai pasar ³⁷.

Garansi atau jaminan keuangan dapat diakui sebagai mitigasi risiko kredit untuk eksposur kredit beragun properti apabila memenuhi syarat sebagai agunan sesuai kerangka mitigasi risiko kredit. Hal tersebut dapat mencakup asuransi kredit beragun properti ³⁸ apabila memenuhi persyaratan operasional kerangka mitigasi risiko kredit untuk garansi. Bank dapat mengakui mitigasi risiko ini dalam menghitung jumlah eksposur; namun, kriteria LTV dan bobot risiko yang akan diterapkan pada jumlah eksposur harus ditentukan sebelum penggunaan teknik mitigasi risiko kredit yang sesuai.

³⁴ Jika nilai disesuaikan lebih rendah, penyesuaian untuk menjadi lebih tinggi setelahnya dapat dilakukan namun tidak boleh melebihi nilai saat pemberian kredit.

³⁵ Jika bank memberikan beberapa pinjaman yang dijamin oleh properti yang sama dan memiliki peringkat *lien* secara berurutan (yaitu tidak ada *lien* dari bank lain yang peringkatnya berada diantara *lien-lien* tersebut) maka beberapa pinjaman tersebut harus diperhitungkan sebagai satu eksposur untuk tujuan pembobotan risiko, dan nilai pinjaman harus ditambahkan untuk menghitung rasio LTV.

³⁶ Valuasi harus dilakukan secara independen dari bagian inisiasi, analisis, dan pengambilan keputusan pemberian kredit beragun properti pada bank.

³⁷ Apabila kredit beragun properti membiayai pembelian properti, nilai properti untuk perhitungan LTV tidak boleh lebih tinggi dari harga pembelian properti.

³⁸ Praktek asuransi *mortgage* harus mengacu pada dokumen *FSB Principles for sound residential mortgage underwriting* (April 2012).

10.1 Eksposur Kredit Beragun rumah tinggal

60. Eksposur kredit beragun rumah tinggal adalah eksposur yang dijamin oleh properti tak bergerak yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi seluruh peraturan yang berlaku yang memungkinkan properti digunakan untuk tujuan perumahan (yaitu rumah tinggal) ³⁹.

³⁹ Untuk properti residensial yang sedang dibangun sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 57, diharapkan bahwa properti dapat memenuhi seluruh peraturan yang berlaku yang memungkinkan properti digunakan untuk tujuan rumah tinggal.

61. Apabila persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi dan paragraf 64, 71 serta 72 tidak berlaku, bobot risiko yang ditetapkan untuk jumlah total eksposur akan ditentukan berdasarkan rasio LTV sebagaimana Tabel 11.

Tabel bobot risiko untuk kredit beragun rumah tinggal (Pelunasan tidak bergantung secara material dari arus kas yang dihasilkan properti)							Tabel 11
	LTV ≤ 50%	50% < LTV ≤ 60%	60% < LTV ≤ 80%	80% < LTV ≤ 90%	90% < LTV ≤ 100%	LTV > 100%	
Bobot risiko	20%	25%	30%	40%	50%	70%	

62. Sebagai alternatif dari pendekatan pada paragraf 61, apabila persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi dan paragraf 64, 71 serta 72 tidak berlaku, OJK dapat menerapkan bobot risiko 20% pada bagian dari eksposur hingga 55% dari nilai properti dan bobot risiko dari debitur sebagaimana ditentukan dalam *footnote* 42 pada sisa eksposur⁴⁰. Apabila terdapat *lien* pada agunan properti yang tidak dikuasai oleh bank, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Kasus 1: bank memiliki *lien* junior dan ada beberapa *lien* senior yang tidak dimiliki oleh bank. Apabila nilai dari seluruh *lien* melebihi 55% dari nilai properti, jumlah *lien* bank yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bobot risiko 20% dihitung sebagai nilai maksimum dari: (i) 55% dari nilai properti dikurangi jumlah *lien* senior; dan (ii) nol. Contohnya, untuk pinjaman € 70.000 kepada individu yang dijamin dengan properti senilai € 100.000, apabila ada *lien* senior sebesar € 10.000 yang dimiliki pihak lain, bank mengenakan bobot risiko 20% pada € 45.000 (= max (€ 55.000 - € 10.000, 0)) dari eksposur dan, berdasarkan *footnote* 42, bobot risiko 75% dikenakan terhadap eksposur sisa sebesar € 25.000. Ketika nilai dari seluruh *lien* tidak melebihi 55% dari nilai properti, bobot risiko 20% akan dikenakan pada eksposur bank.
- Kasus 2: ada beberapa *lien* yang tidak dimiliki bank yang berperingkat *pari passu* dengan *lien* bank dan tidak ada *lien* senior atau junior lainnya. Apabila nilai dari seluruh *lien* melebihi 55% dari nilai properti, porsi dari eksposur bank yang memenuhi syarat untuk dikenakan bobot risiko 20% harus dihitung sebagai perkalian dari: (i) 55% dari nilai properti; dan (ii) eksposur bank dibagi dengan jumlah seluruh klaim *pari passu*. Misalnya, untuk pinjaman € 70.000 kepada individu yang dijamin dengan properti senilai € 100.000, apabila ada klaim berperingkat *pari passu* sebesar € 10.000 yang dimiliki pihak lain, bank mengenakan bobot risiko 20% pada € 48.125 (= € 55.000 * € 70.000 / € 80.000) dari eksposur dan, menurut *footnote* 42, bobot risiko sebesar 75% pada sisa eksposur sebesar € 21,875. Ketika nilai dari seluruh klaim tidak melebihi 55% dari nilai properti, bobot risiko 20% akan dikenakan pada eksposur bank.

⁴⁰ Sebagai contoh, untuk pinjaman € 70.000 kepada individu yang dijamin dengan properti senilai € 100.000, bank menerapkan bobot risiko 20% pada eksposur sebesar € 55.000 dan, sesuai *footnote* 42, bobot risiko 75% dikenakan pada sisa eksposur sebesar € 15.000. Sehingga nilai aset tertimbang menurut risiko pada eksposur tersebut sebesar € 22.250 = (0,20 x € 55.000) + (0,75 x € 15.000).

63. Untuk eksposur dimana salah satu persyaratan dalam paragraf 57 tidak terpenuhi dan paragraf 64, 71 serta 72 tidak berlaku, bobot risiko yang berlaku merupakan bobot risiko dari debitur⁴¹.

⁴¹ Bobot risiko untuk eksposur kepada individu yaitu 75%. Untuk eksposur pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dikenakan bobot risiko 85%. Untuk eksposur pada *counterparty* lain, bobot risiko yang dikenakan adalah bobot risiko kepada *counterparty* tersebut tanpa keberadaan jaminan.

64. Ketika prospek pelunasan pinjaman tergantung secara material⁴² pada arus kas yang dihasilkan oleh properti yang menjamin pinjaman dibandingkan dengan kapasitas debitur untuk melunasi pinjaman dari sumber lain, dan dengan ketentuan bahwa paragraf 71 dan 72 tidak berlaku, eksposur akan dikenakan bobot risiko sebagai berikut:

- apabila seluruh persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi, sesuai bobot risiko berdasarkan rasio LTV sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 12 di bawah ini; dan
- apabila salah satu persyaratan dalam paragraf 57 tidak terpenuhi, bobot risiko ditetapkan sebesar 150%.

Sumber utama arus kas ini umumnya adalah pembayaran sewa, atau penjualan properti rumah tinggal. Karakteristik yang membedakan dari eksposur ini dibandingkan dengan eksposur kredit beragun rumah tinggal lainnya adalah pelunasan pinjaman dan prospek untuk pemulihan dalam hal terjadi gagal bayar bergantung secara material pada arus kas yang dihasilkan oleh properti sebagai agunan eksposur.

Tabel bobot risiko untuk kredit beragun rumah tinggal (Pelunasan bergantung secara material dari arus kas yang dihasilkan properti)							Tabel 12
	LTV ≤ 50%	50% < LTV ≤ 60%	60% < LTV ≤ 80%	80% < LTV ≤ 90%	90% < LTV ≤ 100%	LTV > 100%	
Bobot risiko	30%	35%	45%	60%	75%	105%	

⁴² Diharapkan bahwa kondisi ketergantungan secara material berlaku sebagian besar untuk pinjaman kepada perusahaan korporasi, UMKM atau SPV, tetapi tidak terbatas pada jenis debitur tersebut. Sebagai contoh, pinjaman dapat dianggap tergantung secara material jika lebih dari 50% pendapatan debitur yang digunakan dalam penilaian bank atas kemampuan debitur tersebut untuk melunasi pinjaman yang arus kasnya dihasilkan dari properti residensial.

65. Jenis eksposur berikut ini dikecualikan dari perlakuan yang dijelaskan sebagaimana paragraf 64, namun, tunduk pada perlakuan yang dijelaskan sebagaimana paragraf 61 hingga 63:

- Eksposur dengan jaminan properti yang merupakan tempat tinggal utama debitur;
- Eksposur dengan jaminan unit perumahan yang menghasilkan pendapatan kepada individu yang memiliki pinjaman beragun properti residensial kurang dari sejumlah unit properti atau perumahan tertentu, sebagaimana ditentukan oleh OJK;
- Eksposur dengan jaminan properti residensial kepada asosiasi atau koperasi yang diatur dalam regulasi dan ditujukan hanya untuk tempat tinggal anggotanya; dan
- Eksposur dengan jaminan properti residensial kepada perusahaan perumahan publik dan asosiasi nirlaba yang diatur dalam regulasi yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan penyewaan perumahan jangka panjang.

10.2 Eksposur Kredit Beragun properti komersial

66. Eksposur kredit beragun properti komersial adalah eksposur yang dijamin oleh setiap properti yang tidak bergerak yang bukan merupakan properti residensial sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 60.

67. Apabila persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi dengan ketentuan bahwa paragraf 70, 71 dan 72 tidak berlaku, bobot risiko yang akan dikenakan untuk jumlah total eksposur akan ditentukan berdasarkan rasio LTV pada Tabel 13. Untuk tujuan paragraf 67 hingga 69, “bobot risiko *counterparty*” adalah:

- 75% untuk eksposur kepada perorangan,
- 85% untuk eksposur kepada UMKM dan
- untuk eksposur ke pihak lain, bobot risiko yang dikenakan adalah bobot risiko untuk eksposur tanpa agunan (*unsecured exposure*).

Tabel bobot risiko untuk eksposur beragun properti komersial (Pelunasan tidak bergantung secara material dari arus kas yang dihasilkan properti) Tabel 13		
	LTV ≤ 60%	LTV > 60%
Bobot risiko	Min (60%, bobot risiko <i>counterparty</i>)	Bobot risiko <i>counterparty</i>

68. Sebagai alternatif dari pendekatan pada paragraf 67, apabila persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi dan paragraf 70, 71 serta 72 tidak berlaku, OJK dapat menerapkan bobot risiko 60% atau bobot risiko debitur (mana yang lebih rendah) pada porsi eksposur hingga 55% dari nilai properti⁴³, dan bobot risiko *counterparty* pada sisa eksposur.

⁴³ Apabila ada beberapa *lien* pada properti yang tidak dimiliki oleh bank, porsi dari eksposur hingga 55% dari nilai properti harus dikurangi dengan jumlah *lien* dengan peringkat senior yang tidak dimiliki oleh bank dan dengan persentase pro-rata dari setiap *lien* yang berperingkat *pari passu* dengan *lien* bank namun tidak dimiliki oleh bank. Lihat paragraf 62 untuk contoh bagaimana metodologi ini diterapkan pada eksposur kredit beragun properti residensial.

69. Apabila salah satu persyaratan dalam paragraf 57 tidak terpenuhi dan paragraf 70, 71 serta 72 tidak berlaku, bobot risiko yang diterapkan adalah bobot risiko *counterparty*.

70. Apabila prospek untuk pelunasan pinjaman bergantung secara material⁴⁴ pada arus kas yang dihasilkan dari properti yang menjadi agunan pinjaman dibandingkan kemampuan debitur untuk melunasi hutang dari sumber lain⁴⁵, dan apabila paragraf 71 dan 72 tidak berlaku, eksposur akan diberikan bobot risiko sebagai berikut :

- apabila seluruh persyaratan dalam paragraf 57 terpenuhi, dikenakan bobot risiko sesuai dengan rasio LTV sebagaimana ditetapkan dalam Tabel 14 di bawah ini; dan
- jika salah satu persyaratan pada paragraf 57 tidak terpenuhi, dikenakan bobot risiko sebesar 150%.

Sumber utama dari arus kas ini umumnya adalah pembayaran sewa, atau penjualan properti komersial. Karakteristik yang membedakan eksposur ini dengan eksposur kredit beragun komersial lainnya adalah ketergantungan secara material pada arus kas yang dihasilkan oleh properti sebagai jaminan eksposur untuk pelunasan kredit dan *recovery* dalam hal terjadi gagal bayar.

Tabel bobot risiko untuk eksposur beragun properti komersial (Pelunasan bergantung secara material dari arus kas yang dihasilkan properti) Tabel 14			
	LTV ≤ 60%	60% < LTV ≤ 80%	LTV > 80%
Bobot risiko	70%	90%	110%

⁴⁴ Diharapkan bahwa kondisi ketergantungan secara material berlaku sebagian besar untuk pinjaman kepada perusahaan korporasi, UMK atau SPV, tetapi tidak terbatas pada jenis debitur tersebut. Sebagai contoh, pinjaman dapat dianggap tergantung secara material jika lebih dari 50% pendapatan debitur yang digunakan dalam penilaian bank atas kemampuan debitur tersebut untuk melunasi pinjaman yang arus kasnya dihasilkan dari properti komersial.

⁴⁵ Untuk eksposur tersebut, OJK dapat memperbolehkan bank untuk menerapkan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 67 hingga 68 dengan persyaratan sebagai berikut: (i) kerugian yang berasal dari kredit beragun properti komersial hingga 60% dari LTV tidak boleh melebihi 0,3% dari baki debet pinjaman pada suatu tahun tertentu dan (ii) kerugian keseluruhan yang berasal dari kredit beragun properti komersial tidak boleh melebihi 0,5% dari baki debet pinjaman pada suatu tahun tertentu. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi pada tahun tertentu, pengecualian tersebut dihentikan dan eksposur dimana prospek untuk melunasi pinjaman secara material bergantung pada arus kas yang dihasilkan dari properti yang diagunkan daripada kemampuan debitur untuk melunasi hutang dari sumber lain akan diberikan bobot risiko sebagaimana paragraf 70 sampai kedua persyaratan tersebut terpenuhi di masa depan. Yurisdiksi yang menerapkan perlakuan tersebut harus mengungkapkan kepada publik apakah kondisi tersebut terpenuhi.

10.3 Eksposur pembebasan lahan, pembangunan dan konstruksi

71. Eksposur pembebasan lahan, pembangunan dan konstruksi (*land acquisition, development and construction* (ADC))⁴⁶ merupakan pinjaman kepada perusahaan atau SPV yang membiayai pembebasan tanah untuk tujuan pembangunan dan konstruksi, atau pembangunan dan konstruksi properti residensial atau komersial. Eksposur ADC akan dikenakan bobot risiko sebesar 150%, kecuali jika memenuhi kriteria dalam paragraf 72.

⁴⁶ Eksposur ADC tidak termasuk akuisisi hutan atau lahan pertanian, dimana tidak ada persetujuan perencanaan atau intensi untuk mengajukan permohonan persetujuan perencanaan.

72. Eksposur ADC pada properti residensial dapat diberikan bobot risiko sebesar 100%, sepanjang memenuhi kriteria berikut:

- standar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit memenuhi persyaratan dalam paragraf 57;
- Kontrak pra-penjualan atau pra-sewa memiliki porsi yang signifikan dari total kontrak atau *equity at risk*⁴⁷ yang signifikan. Kontrak pra-penjualan atau pra-sewa harus merupakan kontrak tertulis yang mengikat secara hukum dan pembeli/penyewa harus melakukan setoran tunai signifikan yang dapat disita jika kontrak dihentikan. *Equity at risk* harus ditentukan sebagai jumlah yang sesuai dari ekuitas yang dikontribusikan debitur pada nilai taksiran properti yang telah diselesaikan.

11. Faktor pengali bobot risiko untuk eksposur tertentu dengan *currency mismatch*

73. Untuk eksposur ritel dan properti residensial yang tidak dilakukan lindung nilai dimana mata uang pinjaman berbeda dengan mata uang sumber pendapatan debitur, bank akan menerapkan faktor pengali sebesar 1,5 pada bobot risiko yang berlaku sesuai dengan paragraf 51 hingga 55 dan 60 hingga 65, dengan bobot risiko maksimum sebesar 150%.

74. Untuk tujuan paragraf 73, eksposur yang tidak dilakukan lindung nilai merupakan eksposur kepada debitur yang tidak dilakukan lindung nilai secara alami (*natural hedging*) atau finansial (*financial hedging*) terhadap risiko valuta asing sebagai akibat dari *currency mismatch* antara mata uang sumber pendapatan debitur dengan mata uang pinjaman. *Natural hedging* merupakan lindung nilai dimana debitur, dalam menjalankan usahanya secara normal, menerima pendapatan valuta asing yang sesuai dengan mata uang pinjamannya (misalnya, pengiriman uang, pendapatan sewa, gaji). *Financial hedging* umumnya mencakup kontrak secara hukum dengan lembaga keuangan (misalnya kontrak *forward*). Untuk penerapan faktor pengali, *natural hedging* atau *financial hedging* dianggap memadai apabila menjamin paling sedikit 90% dari angsuran pinjaman, terlepas dari jumlah lindung nilai yang dilakukan.

12. Transaksi Rekening Administratif

75. Transaksi rekening administratif dikonversikan menjadi setara dengan eksposur kredit melalui penggunaan faktor konversi kredit (FKK). Untuk komitmen, eksposur yang dikomitmenkan tetapi belum ditarik akan dikalikan dengan FKK. Komitmen didefinisikan sebagai perjanjian kontrak yang ditawarkan bank dan diterima oleh debitur untuk menggunakan kredit, membeli aset atau menerbitkan fasilitas lain setara kredit (*credit substitutes*).⁴⁷ Ini termasuk: (i) seluruh perjanjian sejenis yang dapat dibatalkan tanpa syarat oleh bank kapanpun tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada debitur, (ii) seluruh perjanjian sejenis yang dapat dibatalkan oleh bank jika debitur gagal memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumentasi fasilitas kredit, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi debitur sebelum pencairan awal atau pencairan berikutnya sesuai perjanjian. Bobot risiko *counterparty* untuk transaksi OTC derivatif tidak dikenakan batas maksimum.

⁴⁷ Sesuai diskresi nasional, suatu yurisdiksi dapat mengecualikan pengaturan dalam perjanjian tertentu dari definisi komitmen yang ada dengan memenuhi kondisi sebagai berikut:

- (i) bank tidak menerima biaya atau komisi untuk menetapkan atau mempertahankan pengaturan dalam perjanjian;
- (ii) debitur diharuskan mengajukan ke bank untuk pencairan awal kredit dan penarikan berikutnya;
- (iii) bank memiliki kuasa penuh atas pelaksanaan pencairan kredit dan kuasa tersebut tidak bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan pencairan oleh debitur yang telah ditetapkan dalam dokumentasi fasilitas kredit;
- (iv) keputusan bank untuk melaksanakan setiap pencairan kredit hanya dibuat setelah menilai kelayakan kredit debitur sebelum dilakukan penarikan. Pengecualian terhadap pengaturan dalam perjanjian yang memenuhi kriteria diatas dibatasi pada pengaturan dalam perjanjian tertentu terhadap korporasi dan UMKM yang terus dipantau secara ketat dan berkelanjutan.

76. FKK 100% dikenakan pada eksposur dibawah ini:

- *Direct credit substitutes*, yaitu jaminan umum atas utang, (termasuk standby L/C sebagai garansi keuangan untuk pinjaman dan surat berharga) dan akseptasi (termasuk *endorsement* yang memiliki karakteristik akseptasi).
- Perjanjian repo dan penjualan aset dengan jaminan (*with recourse*)⁴⁸ di mana risiko kredit tetap berada pada bank.

- Peminjaman surat berharga bank atau penjaminan surat berharga oleh bank, termasuk contoh dimana transaksi ini muncul dari transaksi sejenis repo (yaitu transaksi repo/reverse repo dan pinjam meminjam surat berharga). Pembobotan risiko untuk risiko kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk (CCR)*) harus diterapkan sebagai tambahan terhadap beban modal risiko kredit dari surat berharga yang dipinjamkan atau dijamin, dimana risiko kredit dari surat berharga yang dipinjamkan atau dijamin tersebut masih berada di bank. Paragraf ini tidak berlaku untuk penjaminan yang berkaitan dengan transaksi derivatif yang diperlakukan berdasarkan SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- *Forward asset purchases, forward forward deposits* dan saham dan surat berharga yang dibayar sebagian⁴⁹ yang merupakan komitmen dengan pencairan tertentu.
- Transaksi rekening administratif berupa *credit substitutes* yang tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori manapun.

⁴⁸ Eksposur ini dikenakan bobot risiko berdasarkan jenis aset dan tidak berdasarkan jenis *counterparty* dari transaksi yang dilakukan.

⁴⁹ Eksposur ini dikenakan bobot risiko berdasarkan jenis aset dan tidak berdasarkan jenis *counterparty* dari transaksi yang dilakukan.

77. FKK 50% dikenakan pada *note issuance facilities (NIFs)* dan *revolving underwriting facilities (RUFs)* tanpa bergantung pada jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari.

78. FKK 50% dikenakan pada transaksi tertentu yang berkaitan dengan kontinjensi (misalnya *performance bonds, bid bonds*, waran dan standby L/C yang berkaitan dengan transaksi tertentu).

79. FKK 40% dikenakan pada komitmen tanpa memperhitungkan jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari, kecuali komitmen tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan FKK yang lebih rendah.

80. FKK 20% dikenakan pada bank pembuka (*issuing banks*) dan bank pengkonfirmasi (*confirming banks*) dari *self-liquidating trade L/C* jangka pendek⁵⁰ yang muncul dari perpindahan barang (misalnya *documentary credits* yang dijamin dengan *underlying shipment*)

⁵⁰ Dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada dokumen "*Treatment of trade finance under the Basel capital framework*", Oktober 2011, www.bis.org/publ/bcbs205.pdf

81. FKK 10% akan dikenakan pada komitmen yang (i) setiap saat dapat dibatalkan tanpa syarat oleh bank tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau (ii) dapat dibatalkan otomatis akibat kelayakan kredit debitur yang semakin memburuk. OJK harus mengevaluasi berbagai faktor

dalam yurisdiksinya, yang dapat membatasi kemampuan bank untuk membatalkan komitmen dan mempertimbangkan pengenaan FKK yang lebih tinggi untuk komitmen tertentu.

82. Apabila bank memberikan komitmen pada Transaksi Rekening Administratif, bank harus menerapkan FKK yang lebih rendah dari dua FKK yang berlaku.⁵¹

⁵¹ Sebagai contoh, jika bank memiliki komitmen untuk membuka *short term self-liquidating trade letters of credit* yang berasal dari perpindahan barang, maka dikenakan FKK 20% (bukan 40%) dan jika bank memiliki kewajiban komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat seperti yang dijelaskan pada paragraf 81, akan dikenakan FKK 10% (bukan 100%).

83. Nilai kredit ekivalen dari *Securities Financing Transaction* (SFT) yang menimbulkan *counterparty credit risk* kepada bank harus dihitung menggunakan pendekatan komprehensif pada paragraf 149 sampai 171. Nilai kredit ekivalen dari OTC derivatif menimbulkan *counterparty credit risk* kepada bank harus dihitung sesuai dengan SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

84. Bank harus secara ketat memantau secara ketat transaksi surat berharga, komoditas dan valuta asing yang sejak hari pertama mengalami kegagalan. Beban modal atas transaksi yang gagal harus dihitung sesuai dengan SEOJK mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

85. Bank terekspos risiko atas transaksi surat berharga, komoditas dan transaksi nilai tukar asing yang belum terselesaikan sejak tanggal perdagangan. Transaksi dimaksud harus di perhitungkan dalam kewajiban pemodal tanpa mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan transaksi. Jika transaksi tersebut tidak terdapat dalam neraca (yaitu: pencatatan sesuai tanggal setelmen), nilai eksposur yang belum terselesaikan dikenakan FKK 100%. Bank diharapkan dapat mengembangkan, mengimplementasikan dan memperbaiki sistem pelacakan dan pemantauan eksposur risiko kredit yang berasal dari transaksi yang belum terselesaikan agar bank dapat menghasilkan informasi manajemen yang memfasilitasi tindakan secara tepat waktu. Lebih lanjut, ketika transaksi tersebut tidak melalui mekanisme *delivery-versus-payment* (DvP) atau *payment-versus-payment* (PvP), bank harus menghitung beban modal sesuai KPMU.

86. Bank yang menyediakan proteksi kredit melalui kredit derivatif *first-to-default* atau *second-to-default* akan dikenakan kewajiban pemodal atas instrumen terkait. Bobot risiko dari seluruh aset yang masuk ke dalam kelompok kredit derivatif *first-to-default* harus digabungkan sampai maksimum 1.250% dan dikalikan dengan nilai nominal dari eksposur yang terproteksi kredit derivatif tersebut untuk memperoleh nilai ATMR. Untuk kredit derivatif *second-to-default* diperlakukan serupa, namun dalam menggabungkan bobot risiko, aset dengan nilai ATMR terkecil dapat dikecualikan dari perhitungan. Perlakuan ini dapat diterapkan secara berturut-turut untuk kredit derivatif *nth-to-default*, dimana aset n-1 dengan nilai ATMR terkecil dapat dikecualikan dari perhitungan.

13. Eksposur Jatuh Tempo

87. Eksposur jatuh tempo didefinisikan sebagai eksposur yang telah melewati jatuh tempo selama lebih dari 90 hari atau eksposur terhadap debitur yang gagal bayar. Debitur yang gagal bayar adalah peminjam yang memenuhi salah satu kondisi dibawah ini:
- Kewajiban kredit bernilai signifikan yang telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari. Cerukan (*overdraft*) akan dipertimbangkan sebagai lewat jatuh tempo ketika nasabah telah melebihi batas tarik yang ditetapkan atau memiliki batas tarik yang lebih kecil dari jumlah pinjaman saat ini;
 - Kewajiban kredit bernilai signifikan dalam status non-akrual (contoh: bank pemberi pinjaman tidak lagi mengakui bunga akrual sebagai pendapatan atau, jika diakui, bank harus membentuk cadangan dengan nilai yang ekuivalen);
 - Hapus buku atau pencadangan terhadap akun spesifik dibentuk sebagai hasil dari penurunan kualitas kredit yang dinilai signifikan setelah bank memiliki eksposur kredit terhadap debitur;
 - Kewajiban kredit dijual pada harga yang merugikan secara material;
 - Restrukturisasi bermasalah atas kewajiban kredit yang disetujui oleh bank (yaitu sebuah restrukturisasi yang akan mengurangi kewajiban finansial debitur akibat pengampunan yang dianggap material, atau penundaan pokok, bunga atau (jika relevan) biaya).
 - Debitur sudah dinyatakan bangkrut atau pernyataan sejenis terkait kewajiban kredit debitur terhadap grup bank.
 - Debitur mengajukan atau ditetapkan bangkrut atau mendapatkan kondisi serupa yang dapat menghindarkan atau menunda pembayaran pinjaman setiap kewajiban kredit terhadap grup bank; atau
 - Situasi lainnya ketika bank menilai debitur tidak mungkin membayar kewajiban kredit secara penuh tanpa mengharuskan bank menjual agunan.
88. Untuk eksposur ritel, definisi gagal bayar dapat diterapkan hanya pada kewajiban kredit tertentu, tidak untuk seluruh kewajiban kredit yang dimiliki oleh debitur. Oleh karena itu, apabila suatu debitur memiliki kewajiban kredit yang berpredikat gagal bayar, bank tidak harus memberikan predikat yang sama pada kewajiban kredit lain yang dimiliki oleh debitur tersebut.
89. Dengan pengecualian untuk eksposur beragun properti residensial yang tertuang dalam paragraf 90, porsi eksposur gagal bayar yang tidak dijamin atau digaransi harus diberikan bobot risiko setelah memperhitungkan cadangan khusus yang dibentuk dan hapus buku sebagian, sebagai berikut:
- Bobot risiko 150% jika cadangan khusus kurang dari 20% dari nilai pinjaman tersisa; dan
 - Bobot risiko 100% jika cadangan khusus sama dengan atau lebih besar dari 20% dari nilai pinjaman tersisa.
90. Eksposur beragun properti residensial yang pembayarannya tidak bergantung signifikan terhadap arus kas yang dihasilkan oleh agunan properti harus dikenakan bobot risiko sebesar 100% setelah memperhitungkan cadangan khusus dan hapus buku sebagian. Garansi atau agunan finansial yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka mitigasi risiko

kredit dapat digunakan dalam perhitungan eksposur sesuai dengan paragraf 59.

91. Untuk tujuan penentuan porsi yang dijamin atau digaransi dari eksposur gagal bayar, agunan dan garansi yang dapat diakui ditentukan sebagaimana tercantum pada bagian mitigasi risiko kredit (lihat Bagian D).

14. Aset lainnya

92. Bobot risiko untuk aset lain yang tidak masuk kategori di atas akan dikenakan 100%, dengan pengecualian terhadap eksposur yang disebutkan pada paragraf 93 dan 94.
93. Bobot risiko 0% akan dikenakan pada (i) kas yang dimiliki dan disimpan di bank atau kas dalam perjalanan (*cash in transit*); dan (ii) emas batangan yang disimpan di bank atau disimpan di bank lain secara teralokasi, sepanjang aset emas batangan tersebut didukung dengan liabilitas emas batangan.
94. Bobot risiko 20% dikenakan pada kas yang sedang dalam proses penagihan (*collection*).

B. Pengakuan peringkat eksternal oleh OJK

1. Proses Pengakuan

95. Hanya lembaga pemeringkat kredit yang diakui sebagai institusi penilai kredit eksternal (*External Credit Assessment Institutions* (ECAI)) yang diperbolehkan untuk melakukan penilaian kredit. OJK bertanggung jawab untuk menentukan secara berkala apakah ECAI memenuhi kriteria yang tercantum dalam paragraf 96 dan pengakuan hanya dapat diberikan apabila peringkat ECAI untuk jenis-jenis tagihan telah memenuhi seluruh kriteria dan kondisi. OJK juga harus mempertimbangkan kriteria dan kondisi yang terdapat dalam Kode Etik Perilaku IOSCO untuk Lembaga Penilaian Kredit (*IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies*)⁵² saat menentukan kelayakan ECAI. Proses pengawasan dalam pengakuan ECAI harus dipublikasikan untuk menghindari hambatan masuk (*barriers to entry*) yang tidak diinginkan.

⁵² Tersedia pada tautan www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf.

2. Kriteria kelayakan

96. Suatu ECAI harus memenuhi delapan kriteria berikut:
 - **Objektivitas:** Metodologi dalam penetapan peringkat eksternal harus ketat, sistematis, dan telah divalidasi berdasarkan pengalaman historis. Selain itu, peringkat eksternal harus ditinjau ulang dan responsif terhadap perubahan kondisi keuangan. Sebelum diakui oleh OJK, metodologi pemeringkatan untuk setiap segmen pasar, (termasuk di dalamnya adalah pengujian kembali (*backtesting*) yang ketat), harus sudah diterapkan minimal satu tahun dari kondisi ideal yaitu tiga tahun.
 - **Independensi:** ECAI harus independen dan terbebas dari tekanan politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi pemeringkatan. Secara khusus, ECAI tidak boleh menunda atau menghindari aksi pemeringkatan yang dipicu oleh potensi dampak ekonomi, politik

atau lainnya. Proses pemeringkatan harus terbebas dari setiap hambatan yang berasal dari situasi dimana komposisi dewan direksi atau struktur pemegang saham lembaga pemeringkat kredit (*credit rating agency* (CRA)) dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, ECAI harus memisahkan bisnis pemeringkatannya dari bisnis dan analisis lain, baik secara operasional, hukum dan, (jika memungkinkan) secara fisik.

- **Akses internasional/transparansi:** Peringkat-peringkat individu, elemen-elemen utama yang mendasari penilaian dan partisipasi penerbit dalam proses pemeringkatan, harus tersedia secara publik berdasar non-selektif, kecuali untuk peringkat privat (*private rating*), yang setidaknya tersedia untuk lembaga domestik maupun asing dengan kepentingan yang sah dan dengan ketentuan yang setara. Selain itu, prosedur umum, metodologi, dan asumsi ECAI dalam pemberian peringkat harus dapat dipublikasikan.
- **Pengungkapan:** ECAI harus mengungkapkan informasi sebagai berikut: kode etiknya; sifat umum pengaturan kompensasi terhadap entitas yang dinilai; setiap konflik kepentingan,⁵³ pengaturan kompensasi ECAI,⁵⁴ metodologi penilaiannya termasuk definisi *default*, jangka waktu, dan interpretasi dari setiap penilaian; tingkat *default* aktual pada setiap kategori penilaian; dan transisi peringkat, misalnya kemungkinan peringkat AA menjadi A. Peringkat harus diungkapkan sesegera mungkin setelah diterbitkan. Ketika mengungkapkan suatu peringkat, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, menunjukkan sifat dan batasan peringkat kredit serta risiko apabila terlalu mengandalkan peringkat dalam melakukan investasi.
- **Sumber daya:** ECAI harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian kredit yang berkualitas. Sumber daya tersebut harus diperbolehkan untuk melakukan komunikasi secara substansif dengan level senior dan level operasional pada entitas yang dinilai untuk memberikan nilai tambah terhadap penilaian kredit. Secara khusus, ECAI harus menugaskan analis dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang kompeten untuk menilai kelayakan kredit setiap entitas atau obligasi yang dinilai. Penilaian tersebut harus didasarkan pada metodologi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- **Kredibilitas:** Sampai batas tertentu, kredibilitas mengacu pada kriteria di atas. Selain itu, ketergantungan pihak independen (investor, asuransi, mitra dagang) pada peringkat yang diterbitkan ECAI merupakan bukti kredibilitas dari peringkat yang diterbitkan ECAI. Kredibilitas ECAI juga didukung oleh prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan informasi rahasia. Agar memenuhi syarat untuk diakui, ECAI tidak harus melakukan penilaian terhadap perusahaan di lebih dari satu negara.
- **Tidak ada penyalahgunaan pada peringkat atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited ratings*):** ECAI tidak diperbolehkan menggunakan peringkat *unsolicited* untuk menekan entitas untuk mendapatkan peringkat dengan permintaan kepada ECAI dimaksud. Jika perilaku tersebut ditemukan, OJK harus mempertimbangkan pengakuan terhadap ECAI tersebut dalam rangka pemenuhan kecukupan modal.
- **Kerja sama dengan OJK:** ECAI harus menginformasikan kepada OJK adanya perubahan metodologi yang signifikan dan memberikan akses atas hasil penilaian eksternal serta data relevan lainnya untuk mendukung penentuan kelayakan kali pertama dan seterusnya.

⁵³ Situasi berikut dan pengaruhnya terhadap metodologi pemeringkatan kredit ECAI atau tindakan pemeringkatan kredit setidaknya harus diungkapkan:

- ECAI dibayar untuk menerbitkan peringkat kredit oleh entitas yang dinilai atau oleh obligor, kreditor awal, penjamin emisi, atau penjamin dari kewajiban yang dinilai;
- ECAI dibayar oleh pelanggan yang memiliki kepentingan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh pemeringkatan kredit dari ECAI;
- ECAI dibayar oleh entitas yang dinilai, obligor, *originator*, penjamin emisi, *arranger*, atau pelanggan untuk layanan selain penerbitan peringkat kredit atau memberikan akses ke peringkat kredit ECAI;
- ECAI menyediakan indikasi awal atau indikasi serupa dari kualitas kredit kepada entitas, obligor, *originator*, penjamin emisi, atau *arranger* sebelum dipekerjakan untuk menentukan peringkat kredit final kepada entitas, obligor, *originator*, penjamin emisi, atau *arranger*; dan
- ECAI memiliki kepentingan kepemilikan langsung atau tidak langsung dalam suatu entitas yang diperingkat atau obligor, atau entitas yang diperingkat atau obligor yang memiliki kepemilikan langsung ataupun tidak langsung dalam ECAI.

⁵⁴ Suatu ECAI harus mengungkapkan sifat umum dari pengaturan kompensasinya dengan entitas yang dinilai, obligor, penjamin emisi utama, atau *arranger*.

Ketika ECAI menerima kompensasi yang tidak terkait dengan layanan peringkat kreditnya dari entitas yang diperingkat, obligor, *originator*, penjamin emisi utama, atau *arranger* maka ECAI harus mengungkapkan kompensasi yang tidak terkait tersebut dalam persentase dari total kompensasi tahunan yang diterima dari entitas yang diperingkat, obligor, *originator*, penjamin emisi utama, atau *arranger* dalam laporan pemeringkatan kredit yang relevan atau laporan lain, sebagaimana mestinya. Suatu ECAI harus mengungkapkan dalam laporan pemeringkatan kredit yang relevan atau laporan lain, sebagaimana mestinya, jika menerima 10% atau lebih dari pendapatan tahunannya dari satu klien (misalnya entitas yang diperingkat, obligor, *originator*, penjamin emisi utama, *arranger*, atau *subscriber*, atau afiliasi mereka lainnya).

C. Pertimbangan implementasi pada yurisdiksi yang memperbolehkan penilaian eksternal

1. Proses pemetaan

97. Bank wajib menggunakan ECAI dan peringkat yang dikeluarkan oleh ECAI tersebut secara konsisten untuk semua jenis tagihan apabila ECAI dimaksud telah memenuhi syarat dan diakui oleh OJK untuk keperluan pembobotan risiko dan manajemen risiko. Bank dilarang untuk memilih peringkat yang dikeluarkan oleh ECAI yang berbeda sesuai keinginannya (*cherry-pick*) dan mengganti ECAI yang digunakan.

2. Beberapa peringkat eksternal

98. Apabila terdapat hanya satu peringkat yang dikeluarkan oleh ECAI yang dipilih oleh bank untuk tagihan tertentu, maka peringkat tersebut digunakan untuk menentukan bobot risiko eksposur dimaksud.

99. Apabila terdapat dua peringkat yang dikeluarkan oleh ECAI yang dipilih oleh bank dengan bobot risiko yang berbeda, maka bobot risiko yang lebih tinggi akan digunakan.

100. Apabila terdapat tiga atau lebih peringkat dengan bobot risiko yang berbeda, dua peringkat dengan bobot risiko terendah digunakan sebagai acuan. Apabila kedua bobot peringkat paling rendah tersebut menghasilkan bobot risiko yang sama, maka bobot risiko tersebut yang digunakan. Apabila bobot risikonya berbeda, maka bobot risiko yang lebih tinggi yang digunakan.

3. Penentuan penilaian suatu ekposur: Peringkat Penerbitan Spesifik (*Issue-Specific Rating*) dan Peringkat Penerbit (*Issuer Rating*)

101. Apabila bank berinvestasi pada instrumen tertentu yang memiliki peringkat penerbitan spesifik (*issue-specific rating*), bobot risiko ekposur tersebut akan didasarkan pada peringkat ini. Apabila ekposur bank bukan merupakan investasi pada instrumen yang memiliki peringkat penerbitan spesifik, maka berlaku prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- Dalam hal dimana debitur memiliki peringkat spesifik atas instrumen utang yang diterbitkan – namun ekposur bank bukan merupakan investasi pada instrumen utang tersebut – peringkat kredit yang berkualitas tinggi (memiliki bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan bobot risiko yang berlaku untuk tagihan tanpa peringkat) untuk utang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap ekposur bank tanpa peringkat apabila ranking tagihan tersebut memiliki rangking *pari passu* atau senior terhadap tagihan yang memiliki peringkat. Apabila tidak, peringkat eksternal tidak dapat digunakan dan tagihan yang tidak dinilai dikenakan bobot risiko untuk ekposur tanpa peringkat.
- Dalam hal dimana debitur memiliki peringkat penerbit (*issuer rating*), peringkat tersebut pada umumnya berlaku untuk tagihan senior yang tidak dijamin kepada debitur tersebut. Akibatnya, hanya tagihan senior kepada debitur tersebut yang mendapatkan manfaat dari peringkat penerbit yang berkualitas tinggi. Ekposur lainnya yang tidak dinilai dari penerbit yang berkualitas tinggi akan diperlakukan sebagai tanpa peringkat (*unrated*). Apabila penerbit atau pada salah satu penerbitannya memiliki peringkat yang berkualitas rendah (memiliki bobot risiko yang sama dengan atau lebih tinggi daripada bobot risiko yang berlaku untuk ekposur tanpa peringkat), ekposur yang tidak dinilai kepada *counterparty* yang sama yang memiliki rangking *pari passu* atau menjadi subordinasi terhadap peringkat debitur senior yang tidak dijamin atau ekposur dengan peringkat berkualitas rendah maka dikenakan bobot risiko sama dengan bobot risiko penilaian berkualitas rendah.
- Dalam kondisi dimana penerbit memiliki peringkat spesifik yang berkualitas tinggi (peringkat masuk ke bobot risiko yang lebih rendah) yang hanya berlaku kepada kelas liabilitas tertentu saja (seperti penilaian deposit atau penilaian risiko *counterparty*), prinsip ini hanya dapat digunakan untuk ekposur yang masuk ke dalam kelas tersebut.

102. Bank dapat memiliki intensi untuk bergantung pada peringkat penerbitan spesifik (*issue-specific-rating*) atau peringkat penerbit (*issuer rating*), namun peringkat tersebut wajib mempertimbangkan dan mencerminkan seluruh jumlah ekposur risiko kredit yang dimiliki bank berkaitan dengan semua pembayaran yang akan diterima⁵⁵.

⁵⁵ Sebagai contoh, apabila bank memiliki pokok dan bunga terutang, pemeringkatan wajib memperhitungkan dan merefleksikan risiko kredit yang berhubungan dengan pelunasan pokok dan bunga terutang dimaksud.

103. Untuk menghindari perhitungan ganda atas faktor perbaikan kredit (*credit enhancement factor*), OJK tidak mengakui teknik mitigasi risiko kredit apabila *credit enhancement* telah direfleksikan pada peringkat penerbitan spesifik.

4. Peringkat Mata Uang Domestik (*Domestic Currency Rating*) dan Peringkat Valuta Asing (*Foreign Currency Rating*)

104. Pada eksposur yang dikenakan bobot risiko berdasarkan peringkat eksposur yang ekuivalen dengan debitur, umumnya peringkat valuta asing akan digunakan eksposur dengan denominasi valuta asing. Peringkat mata uang domestik, apabila terpisah, hanya akan digunakan untuk bobot risiko eksposur dalam mata uang domestik ⁵⁶.

⁵⁶ Namun, apabila eksposur muncul dari partisipasi bank dalam pinjaman (i) yang telah diberikan, atau (ii) telah dijamin terhadap konvertibilitas dan risiko transfer diberikan oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDB), maka OJK dapat mempertimbangkan bahwa konvertibilitas dan risiko transfer eksposur tersebut telah dimitigasi. Untuk memenuhi persyaratan ini, MDB wajib memiliki status kreditur yang diutamakan (*preferred creditor status*) dan diakui oleh pasar serta termasuk dalam *footnote* 10 (dalam paragraf 13). Dalam hal ini, untuk keperluan pembobotan risiko, peringkat mata uang domestik debitur dapat digunakan sebagai ganti dari peringkat mata uang asingnya. Dalam hal adanya jaminan terhadap konvertibilitas dan risiko transfer, peringkat mata uang domestik hanya dapat digunakan untuk porsi yang sudah dijamin. Porsi pinjaman yang tidak mendapatkan manfaat dari jaminan tersebut akan dikenakan bobot risiko sesuai dengan peringkat mata uang asingnya.

5. Peringkat jangka-pendek/jangka panjang

105. Untuk keperluan pembobotan risiko, peringkat jangka pendek diperlakukan sebagai peringkat penerbitan spesifik (*issue-specific*), dan hanya dapat digunakan untuk menentukan bobot risiko atas eksposur yang timbul dari fasilitas yang memiliki peringkat (*rated facility*). Peringkat jangka pendek tidak dapat diterapkan sama terhadap eksposur jangka pendek lainnya, kecuali sesuai kondisi dalam paragraf 107. Peringkat jangka pendek tidak dapat digunakan untuk mendukung bobot risiko atas eksposur jangka panjang tanpa peringkat dalam kondisi apapun. Peringkat jangka pendek hanya dapat digunakan untuk eksposur jangka pendek terhadap bank dan korporasi. Tabel di bawah ini berisi kerangka bobot risiko untuk eksposur bank terhadap fasilitas jangka pendek yang spesifik, contohnya yang digunakan untuk penerbitan surat berharga komersial (*commercial paper*):

Tabel bobot risiko untuk peringkat jangka pendek yang spesifik				Tabel 15
Peringkat eksternal	A-1/P-1 ⁵⁷	A-2/P-2	A-3/P-3	Lainnya ⁵⁸
Bobot risiko	20%	50%	100%	150%

⁵⁷ Notasi mengikuti metodologi yang digunakan oleh *Standard & Poor's* dan *Moody's Investor Service*. Peringkat A-1 dari *Standard & Poor's* mencakup peringkat A-1+ dan A-1-.

⁵⁸ Kategori ini mencakup semua peringkat *non-prime* dan peringkat B atau C.

106. Apabila suatu fasilitas yang memiliki peringkat jangka pendek dikenakan bobot risiko sebesar 50%, maka eksposur jangka pendek tanpa peringkat tidak dapat dikenakan bobot risiko di bawah 100%. Apabila suatu penerbit memiliki fasilitas jangka pendek dengan peringkat eksternal yang dikenakan bobot risiko sebesar 150%, maka semua eksposur tanpa peringkat, baik yang jangka pendek atau panjang, akan dikenakan bobot risiko sebesar 150%, kecuali bank menggunakan teknik mitigasi risiko kredit untuk eksposur tersebut.

107. Dalam hal tersedia peringkat jangka pendek, interaksi perlakuan preferensial secara umum

(*general preferential treatment*) untuk eksposur jangka pendek terhadap bank di bawah ini sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 18 akan berlaku:

- *General preferential treatment* untuk eksposur jangka pendek berlaku untuk semua eksposur kepada bank dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan tiga bulan apabila tidak ada penilaian tagihan jangka pendek yang spesifik.
- Ketika terdapat peringkat jangka pendek dan peringkat tersebut termasuk dalam bobot risiko yang lebih menguntungkan (lebih rendah) atau sama dengan yang berasal dari *general preferential treatment*, peringkat jangka pendek digunakan hanya untuk eksposur tersebut saja. Eksposur jangka pendek lainnya akan mendapatkan manfaat dari *general preferential treatment*.
- Ketika terdapat peringkat jangka pendek yang spesifik untuk eksposur jangka pendek kepada bank yang termasuk dalam bobot risiko yang kurang menguntungkan (lebih tinggi), perlakuan *general preferential treatment* jangka pendek untuk eksposur antarbank tidak dapat digunakan. Semua eksposur jangka pendek tanpa peringkat dikenakan bobot risiko yang sama dengan bobot risiko peringkat jangka pendek spesifik tersebut.

108. Ketika peringkat jangka pendek digunakan, institusi yang memberikan penilaian wajib memenuhi semua kriteria dari ECAI yang diakui, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 96.

6. Tingkat Penggunaan Peringkat

109. Peringkat eksternal atas satu entitas pada suatu kelompok entitas usaha tidak dapat digunakan untuk menilai bobot risiko entitas lainnya pada kelompok yang sama.

7. Penggunaan peringkat atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited ratings*)

110. Sesuai aturan umum, bank harus menggunakan peringkat yang diterbitkan ECAI yang diakui. OJK dapat memperbolehkan bank untuk menggunakan peringkat atas inisiatif lembaga pemeringkat (*unsolicited ratings*) sebagaimana dengan peringkat atas inisiatif pihak yang diperingkat (*solicited rating*) apabila kualitas *unsolicited ratings* tidak lebih buruk daripada kualitas *solicited ratings* secara umum.

D. Teknik Mitigasi Risiko Kredit untuk Eksposur Tertimbang Menurut Risiko Berdasarkan Pendekatan Standar

1. Isu-isu keseluruhan

(i) Pendahuluan

111. Bank menggunakan sejumlah teknik untuk memitigasi risiko kredit. Sebagai contoh: eksposur dapat dijamin dengan tagihan prioritas utama (*first-priority claims*), baik seluruhnya atau sebagian, dengan uang tunai atau surat berharga, eksposur kredit yang dijamin oleh pihak ketiga, atau bank dapat membeli *credit derivative* untuk memitigasi risiko kredit. Selain itu bank juga dapat melakukan net atas pinjaman terhadap simpanan dari *counterparty* yang sama.⁵⁹

⁵⁹ “*Counterparty*” adalah pihak dimana bank memiliki eksposur kredit pada *on* atau *off balance sheet*. Eksposur tersebut dapat berupa pinjaman dalam bentuk uang tunai atau surat berharga, surat berharga yang digunakan sebagai jaminan, komitmen atau eksposur dalam kontrak OTC derivatif.

112. Kerangka pada bagian ini berlaku untuk eksposur *banking book* yang dikenakan bobot risiko berdasarkan pendekatan standar.

(ii) Persyaratan Umum

113. Transaksi yang tidak menggunakan Teknik MRK dikenakan persyaratan permodalan yang lebih tinggi dibandingkan transaksi yang sama dengan menggunakan teknik MRK.

114. Persyaratan pengungkapan sesuai Pilar 3 harus dipenuhi bank untuk mendapatkan keringanan persyaratan permodalan terkait penggunaan teknik MRK.

115. Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit, teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda. Oleh karena itu, OJK tidak diperbolehkan mengakui tambahan pengakuan teknik MRK untuk perhitungan persyaratan modal minimum pada eksposur yang bobot risikonya telah mencerminkan pengakuan teknik MRK tersebut. *Principal-only ratings* tidak diperbolehkan dalam penggunaan teknik MRK sesuai dengan paragraf 102.

116. Meskipun penggunaan teknik MRK dapat mengurangi atau memindahkan risiko kredit, namun pada saat yang sama teknik tersebut dapat meningkatkan risiko lainnya, seperti risiko hukum, operasional, likuiditas dan pasar. Oleh karena itu bank harus memiliki proses dan prosedur yang memadai untuk mengendalikan risiko-risiko dimaksud, termasuk strategi, pertimbangan atas eksposur yang mendasari pemberian kredit, valuasi, kebijakan dan prosedur, sistem terkait teknik MRK, pengendalian risiko terkait pembiayaan kembali pinjaman (*roll-off risk*), pengelolaan risiko konsentrasi yang timbul dari penggunaan teknik MRK dan interaksinya dengan profil risiko kredit bank secara keseluruhan. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikendalikan secara memadai, maka OJK dapat meminta tambahan modal atau tindakan pengawasan sesuai dengan Pilar 2.

117. Agar teknik MRK dapat memberikan proteksi, kualitas kredit dari *counterparty* tidak boleh memiliki korelasi positif yang material dengan teknik MRK yang digunakan atau dengan risiko lainnya yang timbul sebagaimana dijelaskan pada paragraf 116. Sebagai contoh, surat

berharga yang diterbitkan oleh *counterparty* (atau entitas yang terkait dengan *counterparty*) memberikan sedikit proteksi sebagai jaminan sehingga dinilai tidak memadai.

118. Dalam hal dimana bank menggunakan beberapa teknik MRK untuk satu eksposur (misalnya bank memiliki jaminan dan garansi untuk satu eksposur), bank harus memisahkan eksposur sesuai porsi yang dijamin untuk setiap teknik MRK (misalnya porsi yang dijamin dengan jaminan dan porsi yang dijamin dengan garansi) dan perhitungan ATMR untuk setiap porsi tersebut harus dilakukan secara terpisah. Apabila proteksi kredit menggunakan satu penyedia proteksi yang sama namun memiliki jatuh tempo yang berbeda, maka juga harus dipisahkan.

(iii) Persyaratan Legal

119. Agar bank mendapatkan keringanan persyaratan permodalan terkait penggunaan teknik MRK, semua dokumentasi yang terkait dengan transaksi yang dijamin, perjanjian *on-balance sheet netting*, garansi dan kredit derivatif harus mengikat seluruh pihak dan berlaku secara hukum dalam yurisdiksi terkait. Bank harus melakukan kajian hukum yang memadai untuk meneliti hal tersebut dan menggunakan dasar hukum yang jelas dalam mengambil kesimpulan, serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penerapannya.

(iv) Perlakuan Umum pada Ketidakesesuaian Jatuh Tempo (*maturity mismatches*)

120. Dalam perhitungan ATMR, *maturity mismatches* terjadi jika sisa jatuh tempo dari proteksi kredit (misalnya lindung nilai) lebih pendek dibanding sisa jatuh tempo eksposur.

121. Dalam pendekatan sederhana (*simple approach*), *maturity mismatches* tidak diperbolehkan dalam penggunaan agunan keuangan (lihat paragraf 141).

122. Dalam pendekatan lain, ketika terdapat *maturity mismatches* maka kontrak proteksi kredit hanya dapat diakui jika pada awal kontrak jatuh temponya ≥ 1 tahun dan sisa jatuh tempo kontrak tersebut ≥ 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, MRK dapat diakui sebagian sebagaimana dijelaskan pada paragraf 123.

123. Dalam kondisi terdapat *maturity mismatch* dengan MRK yang diakui, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:

$$P_a = P \cdot \frac{t - 0.25}{T - 0.25}$$

Dimana:

P_a = nilai proteksi kredit yang disesuaikan.

P = nilai proteksi kredit (contoh: nilai agunan, nilai garansi) yang disesuaikan untuk setiap *haircuts*.

T = $\min \{T, \text{sisa jatuh tempo dari kontrak proteksi kredit dalam tahun}\}$

T = $\min \{5 \text{ tahun, sisa jatuh tempo dari eksposur dalam tahun}\}$

124. Jatuh tempo dari eksposur dan jatuh tempo dari lindung nilai harus didefinisikan secara

konservatif. Jatuh tempo efektif dari eksposur harus diukur sebagai sisa jangka waktu yang terpanjang sebelum *counterparty* memenuhi kewajibannya, dengan memperhitungkan setiap *grace period* yang berlaku. Untuk lindung nilai, opsi yang melekat yang dapat mengurangi jangka waktu lindung nilai harus diperhitungkan sehingga jatuh tempo efektif dari eksposur merupakan yang terpendek. Sebagai contoh: dalam hal kredit derivatif jika penjual proteksi memiliki *call option*, maka jatuh temponya adalah tanggal pertama kredit derivatif tersebut dapat dieksekusi. Demikian juga, apabila pembeli proteksi memiliki *call option* dan memiliki insentif yang kuat untuk melakukan eksekusi pada tanggal pertama diperbolehkannya eksekusi, misalnya karena akan timbul biaya *step-up*, maka jatuh tempo efektif adalah sisa jangka waktu sampai dengan tanggal pertama diperbolehkannya eksekusi.

(v) Ketidaksesuaian mata uang (*currency mismatches*)

125. *Currency mismatches* diperbolehkan dalam dua pendekatan. Dalam pendekatan sederhana, tidak terdapat perlakuan khusus untuk *currency mismatches* karena telah terdapat nilai minimum (*floor*) dari bobot risiko yaitu sebesar 20%. Dalam pendekatan komprehensif untuk garansi dan kredit derivatif, terdapat penyesuaian sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 158 dan 193.

2. Teknik Mitigasi Risiko Kredit⁶⁰

⁶⁰ Terdapat pada SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

(i) Transaksi dengan agunan

126. Yang tergolong transaksi dengan agunan adalah transaksi dimana:

- Bank memiliki eksposur kredit atau potensi eksposur kredit (*potential credit exposure*); dan
- eksposur kredit atau *potential credit exposure* tersebut dilindung nilai, baik seluruhnya atau sebagian, dengan agunan dari *counterparty* atau dari pihak ketiga yang bertindak atas kuasa *counterparty*.

Apabila bank memiliki agunan keuangan yang memadai maka bank dapat mengurangi perhitungan KPMM dengan penggunaan teknik MRK

127. Bank dapat memilih salah satu pendekatan berikut:

- (i) Pendekatan sederhana, yaitu mengganti bobot risiko *counterparty* dengan bobot risiko agunan untuk porsi eksposur yang dijamin dengan agunan (pada umumnya berlaku *floor* sebesar 20%); atau
- (ii) Pendekatan komprehensif, yaitu memperbolehkan pengurangan nilai eksposur dengan nilai agunan (*offset*) yang lebih akurat, yang secara efektif mengurangi nilai eksposur dengan nilai agunan setelah disesuaikan dengan volatilitasnya (*volatility-adjusted value*). Persyaratan operasional secara rinci untuk kedua pendekatan diatas dapat dilihat pada paragraf 140 sampai 171. Bank hanya dapat memilih salah satu pendekatan tersebut (tidak boleh keduanya) pada *banking book*.

128. Untuk transaksi OTC dengan agunan, derivatif yang diperdagangkan di bursa dan *long settlement transactions*, bank menggunakan pendekatan standar untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk* (SA-CCR)).

(ii) Saling Hapus Dalam Neraca (*On-balance Sheet Netting*)

129. Ketika bank memiliki perjanjian saling hapus (*netting*) yang berlaku secara hukum untuk pinjaman dan simpanan yang memenuhi kondisi pada paragraf 179 maka Bank dapat menghitung persyaratan permodalan dengan menggunakan eksposur kredit bersih.

(iii) Garansi dan Derivatif Kredit (*Credit Derivatives*)

130. Apabila garansi atau derivatif kredit memenuhi kondisi operasional minimum sebagaimana dijelaskan pada paragraf 180 sampai 182, bank dapat memperhitungkan proteksi kredit dari teknik MRK tersebut dalam menghitung persyaratan permodalan.

131. Pemberi garansi dan proteksi serta pendekatan substitusi diakui dan diterapkan dalam perhitungan persyaratan permodalan. Hanya garansi dan proteksi yang diberikan oleh entitas dengan bobot risiko yang lebih rendah dari *counterparty* yang dapat mengurangi beban modal atas eksposur yang digaransi mengingat hanya porsi yang diproteksi dari eksposur *counterparty* yang dikenakan bobot risiko dari penyedia garansi atau proteksi, sedangkan porsi yang tidak diproteksi tetap dikenakan bobot risiko *counterparty*.

132. Kondisi dan persyaratan operasional untuk garansi dan derivatif kredit dijelaskan pada paragraf 180 sampai 194.

3. Transaksi dengan Agunan (*Collateralised transactions*)

(i) Persyaratan Umum

133. Paragraf 134 sampai 139 harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keringanan modal diberikan karena penggunaan setiap jenis agunan, tanpa memperhatikan penggunaan yang digunakan (apakah pendekatan sederhana atau pendekatan komprehensif). Bank yang meminjamkan surat berharga atau memberikan agunan harus menghitung kebutuhan modal sebagai berikut: (i) risiko kredit atau risiko pasar dari surat berharga, jika surat berharga atau agunan tersebut tetap berada di bank; dan (ii) *counterparty credit risk* yang timbul akibat risiko kegagalan dari peminjam surat berharga.

134. Mekanisme legal dari agunan yang dijaminan atau diserahkan harus memberikan kepastian bahwa bank memiliki hak untuk melikuidasi atau mengambil alih secara hukum, dengan tepat waktu, apabila terjadi kondisi *default* atau insolvensi (atau satu atau lebih *credit event* yang tercantum pada dokumen transaksi) dari *counterparty* (termasuk dari kustodian yang menyimpan agunan, apabila berlaku). Selain itu, bank harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kepentingan bank terhadap keamanan agunan, misal dengan mendaftarkan agunan tersebut kepada pihak yang berwenang, atau mengeksekusi hak untuk melakukan saling hapus terkait dengan pemindahan kepemilikan agunan.

135. Bank harus memiliki prosedur yang jelas dan memadai untuk melakukan likuidasi agunan secara tepat waktu untuk memastikan seluruh kondisi legal yang dibutuhkan untuk menyatakan kegagalan *counterparty* terpantau dan likuidasi agunan dapat dilakukan seketika.
136. Bank harus memastikan bahwa sumber daya yang memadai dikhususkan untuk melaksanakan perjanjian *margin* secara teratur dengan *counterparty* derivatif OTC dan *securities-financing*, yang diukur dengan ketepatan waktu dan akurasi dari *outgoing margin calls* dan waktu respon dari *incoming margin calls*. Bank harus memiliki kebijakan manajemen risiko terkait agunan untuk mengendalikan, memantau dan melaporkan:
- risiko yang timbul dari perjanjian *margin* (seperti volatilitas dan likuiditas dari surat berharga yang dipertukarkan sebagai agunan);
 - risiko konsentrasi untuk jenis agunan tertentu;
 - penggunaan kembali agunan (baik secara tunai maupun non tunai) termasuk potensi kekurangan likuiditas akibat penggunaan kembali agunan yang diterima dari *counterparty*; dan
 - penyerahan hak atas agunan yang diberikan kepada *counterparty*.
137. Apabila agunan disimpan oleh kustodian, bank harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kustodian memisahkan agunan tersebut dari aset milik kustodian.
138. Persyaratan permodalan harus berlaku pada kedua sisi transaksi. Sebagai contoh, *repo* dan *reverse repo*. Demikian juga pada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman surat berharga, serta pemberian surat berharga sebagai jaminan yang terkait dengan eksposur derivatif atau transaksi pinjaman lainnya akan dikenakan beban modal.
139. Apabila Bank bertindak sebagai agen, memfasilitasi transaksi *repo-style* (yaitu transaksi *repo/reverse repo* dan pinjam meminjam surat berharga) antara nasabah dan pihak ketiga dan menyediakan garansi kepada nasabah bahwa pihak ketiga akan memenuhi kewajibannya, maka risiko yang dimiliki bank dinilai sama seperti bank melakukan transaksi sebagai prinsipal. Dalam kondisi demikian, Bank harus menghitung kebutuhan modal selayaknya sebagai prinsipal.

(ii) Pendekatan Sederhana

Persyaratan Umum untuk Pendekatan Sederhana

140. Dalam pendekatan sederhana, bobot risiko *counterparty* digantikan dengan bobot risiko dari instrumen agunan yang menjamin sebagian atau seluruh eksposur.
141. Untuk dapat diakui dalam pendekatan sederhana, agunan harus dijaminakan paling tidak

sepanjang jangka waktu eksposur dan harus di-*mark-to-market* serta di-nilai-ulang minimal setiap enam bulan sekali. Porsi eksposur yang dijamin dengan agunan yang diakui secara nilai pasar dikenakan bobot risiko sesuai dengan instrumen agunan. Bobot risiko dimaksud memiliki batas bawah (*floor*) sebesar 20%, kecuali apabila terdapat kondisi yang dijelaskan pada paragraf 144 sampai 148. Sisa porsi eksposur yang tidak dijamin dikenakan bobot risiko sesuai dengan bobot risiko *counterparty*. Dalam pendekatan sederhana, *Maturity mismatches* tidak diperbolehkan (lihat paragraf 120 dan 121).

Agunan Keuangan yang Diakui Berdasarkan Pendekatan Sederhana

142. Berikut adalah instrumen agunan yang diakui berdasarkan pendekatan sederhana:

- (a) Kas (termasuk sertifikat deposito atau instrumen sejenis yang diterbitkan oleh Bank pemberi pinjaman) pada Bank yang memiliki eksposur terhadap *counterparty*.^{61, 62}
- (b) Emas
- (c) Untuk :
 - (i) surat utang yang diberikan peringkat oleh ECAI yang diakui apabila memiliki peringkat:
 - minimal BB- apabila diterbitkan oleh pemerintah atau entitas sektor publik yang diakui sebagai pemerintah oleh OJK; atau
 - minimal BBB- apabila diterbitkan oleh entitas lain (termasuk bank dan lembaga keuangan lain yang diatur secara prudensial); atau
 - minimal A-3/P-3 untuk instrumen utang jangka pendek.
 - (ii) surat utang yang tidak diberikan peringkat oleh ECAI yang diakui apabila:
 - diterbitkan oleh Bank; dan
 - tercatat pada bursa yang diakui; dan
 - tergolong sebagai utang senior (*senior debt*); dan
 - surat utang yang dikategorikan dalam senioritas yang sama oleh bank penerbit yang diberikan peringkat minimal BBB- atau A-3/P-3 oleh ECAI yang diakui; dan
 - Bank yang memegang surat berharga sebagai agunan tidak memiliki informasi yang mendasari untuk memberikan peringkat dibawah BBB- atau A-3/P-3 (apabila memungkinkan); dan
 - OJK memiliki keyakinan bahwa likuiditas pasar surat berharga memadai.
- (d) Ekuitas (termasuk obligasi konversi (*convertible bonds*)) yang termasuk dalam indeks utama.
- (e) *Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities* (UCITS) dan reksadana apabila:
 - Kuotasi harga untuk setiap unit tersedia secara publik setiap hari; dan
 - UCITS/reksadana memiliki portofolio investasi yang terbatas pada instrumen sebagaimana disebutkan pada paragraf ini.⁶³

⁶¹ *Cash-funded credit-linked notes* yang diterbitkan oleh bank terhadap eksposur *banking book* yang memenuhi kriteria untuk derivatif kredit diperlakukan sebagai transaksi dengan agunan uang tunai.

⁶² Ketika deposito tunai, sertifikat deposito atau instrumen sejenis yang diterbitkan oleh bank pemberi pinjaman diakui sebagai agunan pada bank pihak ketiga dalam *non-custodial arrangement*, jika mereka secara terbuka dijamin/diserahkan ke bank pemberi pinjaman dan jika penjaminan tidak bersyarat

dan tidak dapat dibatalkan, maka jumlah eksposur yang dijamin oleh agunan (setelah memperhitungkan setiap *haircut* untuk risiko mata uang) dikenakan bobot risiko bank pihak ketiga.

⁶³ Namun demikian, penggunaan atau potensi penggunaan instrumen derivatif oleh UCITS/reksadana yang dilakukan hanya untuk lindung nilai investasi yang disebutkan pada paragraf ini dan paragraf 153 tidak menjadikan unit dalam UCITS/reksadana tersebut menjadi tidak diakui sebagai agunan keuangan.

143. Resekritisasi yang didefinisikan dalam kerangka sekritisasi bukan merupakan agunan keuangan yang diakui.

Pengecualian *floor* bobot risiko pada pendekatan sederhana

144. Transaksi *repo-style* yang memenuhi seluruh kondisi berikut dikecualikan dari *floor* bobot risiko pada pendekatan sederhana:

- (a) eksposur dan agunan berupa uang tunai atau surat berharga pemerintah atau entitas sektor publik yang mendapatkan bobot risiko 0% dalam pendekatan standar;
- (b) eksposur dan agunan berdenominasi mata uang yang sama;
- (c) (i) transaksi *overnight* atau (ii) eksposur dan agunan, keduanya dinilai secara *mark-to-market* dan dilakukan *remargining* harian;
- (d) setelah kegagalan *counterparty* untuk *remargin*, waktu yang dibutuhkan antara *mark-to-market* terakhir sebelum kegagalan untuk *remargin* dan likuidasi agunan tidak melebihi 4 hari kerja;
- (e) Transaksi diselesaikan antar sistem penyelesaian (*settlement system*) yang terbukti untuk jenis transaksi tersebut;
- (f) Dokumentasi yang mencakup perjanjian merupakan dokumentasi standar di pasar keuangan untuk transaksi *repo-style* atas surat berharga;
- (g) Transaksi yang mengacu pada dokumentasi yang menyebutkan bahwa apabila *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan uang tunai atau surat berharga atau *margin* atau bahkan mengalami kegagalan (*defaults*), maka transaksi harus dapat segera dihentikan; dan
- (h) untuk setiap kejadian kegagalan (*default event*), tanpa melihat apakah *counterparty* mengalami insolvensi atau kebangkrutan, bank memiliki hak yang tidak terbatas yang dapat dijalankan secara hukum untuk segera menyita dan melikuidasi agunan untuk kepentingan bank.

145. Pelaku utama pasar keuangan dapat mencakup, dengan diskresi dari OJK, entitas sebagai berikut:

- (a) Pemerintah, Bank Sentral, dan Entitas Sektor Publik;
- (b) Bank dan Perusahaan Sekuritas;
- (c) Lembaga Jasa Keuangan lainnya (termasuk perusahaan asuransi) yang layak mendapatkan bobot risiko 20% berdasarkan pendekatan standar;
- (d) Reksadana yang dikenakan persyaratan modal atau *leverage*;
- (e) Dana Pensiun; dan
- (f) *Central counterparty* yang berkualifikasi (*Qualifying central counterparties (QCCPs)*).

146. Transaksi Repo yang memenuhi persyaratan pada paragraf 144 mendapat bobot risiko 10% atau dikecualikan dari *floor* bobot risiko pada paragraf 141. Apabila *counterparty* pada transaksi tersebut merupakan pelaku utama pasar keuangan, bank dapat mengenakan bobot risiko 0% untuk transaksi tersebut.

147. Transaksi derivatif OTC yang di-*mark-to-market* harian, dijamin dengan agunan uang tunai dan tidak terdapat *currency mismatch* maka transaksi tersebut dapat dikenakan bobot risiko 0%. Transaksi dimaksud yang dijamin dengan surat berharga pemerintah atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko 0% berdasarkan pendekatan standar dapat dikenakan bobot risiko 10%.

148. *Floor* bobot risiko 20% pada transaksi yang dijamin dengan agunan tidak berlaku dan dapat dikenakan bobot risiko 0% apabila eksposur dan agunan berdenominasi mata uang yang sama, dan salah satu dari berikut:

- agunan berupa simpanan uang tunai sebagaimana dijelaskan pada paragraf 142(a); atau
- agunan berupa surat berharga pemerintah/entitas sektor publik dengan bobot risiko 0%, dan nilai pasar nya telah didiskonto sebesar 20%.

(iii) Pendekatan Komprehensif

(a) Persyaratan Umum untuk Pendekatan Komprehensif

149. Dalam pendekatan komprehensif, ketika Bank menerima agunan, Bank harus menghitung eksposurnya yang telah disesuaikan kepada *counterparty* dalam rangka memperhitungkan efek mitigasi risiko dari agunan. Bank harus menggunakan *supervisory haircut* yang berlaku (*applicable supervisory haircut*) untuk menyesuaikan (i) nilai eksposur pada *counterparty* dan (ii) nilai agunan yang diterima dari *counterparty* untuk mengantisipasi kemungkinan fluktuasi salah satu nilai dimaksud⁶⁴ di kemudian hari akibat pergerakan pasar. Kecuali salah satu sisi transaksi berupa uang tunai atau menggunakan *haircut* 0%, nilai eksposur yang disesuaikan berdasarkan volatilitasnya (*volatility-adjusted exposure*) lebih besar dari nilai nominal eksposur dan nilai agunan yang disesuaikan berdasarkan volatilitasnya (*volatility-adjusted collateral*) lebih rendah dari nilai nominal agunan.

⁶⁴ Nilai eksposur dapat bervariasi apabila, sebagai contoh, surat berharga sedang dipinjamkan.

150. Besarnya nilai *haircut* tergantung pada jenis instrumen, jenis transaksi, sisa jatuh tempo dan frekuensi *mark-to-market* dan *remargining* sebagaimana dijelaskan pada paragraf 157. Nilai *haircut* harus dihitung menggunakan formula dengan mengacu pada frekuensi *remargining* atau *mark-to-market* sebagaimana tercantum pada paragraf 165.

151. Selain itu, apabila eksposur dan agunan menggunakan mata uang berbeda, bank harus menerapkan *haircut* tambahan untuk nilai agunan yang disesuaikan dengan volatilitasnya sesuai dengan paragraf 158 dan 193 dalam rangka mengantisipasi kemungkinan fluktuasi nilai tukar di kemudian hari.

(b) Agunan Keuangan yang Diakui Berdasarkan Pendekatan Komprehensif

152. Instrumen agunan berikut diakui berdasarkan pendekatan komprehensif:

- (a) Seluruh instrumen yang tercantum pada paragraf 142;
- (b) Ekuitas dan Obligasi Konversi yang tidak termasuk dalam indeks utama namun tercatat pada bursa yang diakui;
- (c) UCITS/reksadana yang meliputi instrumen pada poin (b).

(c) Perhitungan KPMM untuk transaksi yang dijamin dengan agunan keuangan

153. Untuk transaksi dengan agunan keuangan, nilai eksposur setelah mitigasi risiko dihitung sebagai berikut:

$$E^* = \max\{0, E \cdot (1 + H_e) - C \cdot (1 - H_c - H_{fx})\}$$

Dimana:

E^* = nilai eksposur setelah mitigasi risiko

E = nilai eksposur awal

H_e = *haircut* yang sesuai untuk eksposur

C = nilai agunan awal

H_c = *haircut* yang sesuai untuk agunan

H_{fx} = *haircut* yang sesuai untuk *currency mismatch* antara agunan dan eksposur

154. Dalam hal terdapat *maturity mismatch*, nilai agunan harus disesuaikan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 120 sampai 124.

155. Nilai eksposur setelah mitigasi risiko (E^*) harus dikalikan dengan bobot risiko dari *counterparty* untuk mendapatkan nilai aset tertimbang menurut risiko untuk transaksi dengan agunan.

156. Untuk *supervisory haircut* berikut (dengan asumsi *mark-to market* harian, *remargining* harian, dan kepemilikan selama 10 hari kerja) yang dinyatakan dalam persentase, harus digunakan untuk menentukan *haircut* yang sesuai dengan agunan (H_c) dan eksposur (H_e):

Supervisory haircut berdasarkan pendekatan komprehensif				
				Tabel 16
Peringkat surat utang saat diterbitkan	Sisa jatuh tempo	Pemerintah ⁶⁵	Penerbit lainnya ⁶⁶	Eksposur sekuritisasi ⁶⁷
AAA sampai AA-/A-1	≤ 1 tahun	0,5	1	2
	> 1 tahun, ≤ 3 tahun	2	3	8
	> 3 tahun, ≤ 5 tahun		4	
	> 5 tahun, ≤ 10 tahun	4	6	16
	> 10 tahun		12	
A+ sampai BBB-/A-2/A-3/P-3 dan surat berharga bank tanpa peringkat sebagaimana paragraf. 142(c)(ii)	≤ 1 tahun	1	2	4
	> 1 tahun, ≤ 3 tahun	3	4	12
	> 3 tahun, ≤ 5 tahun		6	
	> 5 tahun, ≤ 10 tahun	6	12	24
	> 10 tahun		20	

BB+ sampai BB-	semua	15	Tidak diakui	Tidak diakui
Indeks ekuitas utama (termasuk obligasi konversi) dan emas		20		
Ekuitas dan Obligasi Konversi yang tidak termasuk dalam indeks utama namun tercatat pada bursa yang diakui		30		
UCITS/Reksadana		Nilai <i>haircut</i> tertinggi diterapkan untuk surat berharga yang digunakan sebagai investasi, kecuali bank dapat menerapkan <i>look-through approach</i> (LTA) untuk <i>equity investments in funds</i> , dalam hal bank dapat menggunakan rata-rata tertimbang <i>haircut</i> yang berlaku untuk instrumen yang dimiliki oleh <i>fund</i> .		
Uang tunai dalam mata uang yang sama ⁶⁸		0		

⁶⁵ Termasuk entitas sektor publik yang diperlakukan sama dengan pemerintah oleh OJK, dan juga MDB yang memiliki bobot risiko 0%.

⁶⁶ Termasuk entitas sektor publik yang tidak diperlakukan sama dengan pemerintah oleh OJK.

⁶⁷ Eksposur sekuritisasi yang memenuhi definisi sesuai POJK tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

⁶⁸ Agunan uang tunai yang diakui sebagaimana dijelaskan pada paragraf 142(a).

157. *Haircut* untuk risiko nilai tukar (H_{fx}) dimana eksposur dan agunan berdenominasi dalam mata uang berbeda adalah sebesar 8% (juga berdasarkan *holding period* selama 10 hari kerja dan *mark-to-market* harian).

158. Untuk SFTs dan transaksi peminjaman yang dijamin, penyesuaian *haircut* dapat diterapkan sesuai dengan paragraf 161 sampai 164.

159. Untuk SFTs dimana bank meminjamkan atau menyerahkan sebagai agunan, instrumen yang tidak diakui, dikenakan *haircut* sebesar 30%. Untuk transaksi dimana bank meminjam instrumen yang tidak diakui, mitigasi risiko kredit tidak dapat diterapkan.

160. Apabila agunan berupa kumpulan sejumlah aset, maka *haircut* untuk kumpulan aset tersebut adalah

$$H = \sum_i a_i H_i$$

a_i = bobot dari setiap aset dalam kumpulan aset (dalam satuan mata uang)

H_i = *haircut* yang berlaku untuk setiap aset.

(d) Penyesuaian untuk holding period yang berbeda dan *mark-to-market* atau *remargining* tidak secara harian

161. Untuk beberapa transaksi, tergantung pada sifat dan frekuensi dari revaluasi dan cadangan *remargining*, holding period yang berbeda, maka berlaku *haircut* yang berbeda. Kerangka untuk *haircut* agunan membedakan antara transaksi *repo-style* (yaitu *repo/reverse repo* dan pinjam/meminjam surat berharga), "transaksi yang dipengaruhi pasar modal (*capital*

markets-driven transactions) lainnya” (yaitu transaksi derivatif OTC dan *margin lending*) dan *secured lending*. Pada transaksi *repo-style* dan “transaksi yang dipengaruhi pasar modal” (*capital-market-driven transactions*), dokumentasi mencakup klausul *remargining*, namun biasanya tidak dalam transaksi *secured lending*.

162. *Holding period* minimal untuk berbagai produk terangkum pada tabel berikut:

Penyesuaian untuk <i>supervisory haircut</i>		
Untuk periode <i>holding</i> berbeda dan <i>mark-to-market</i> atau <i>remargining</i> tidak secara harian Tabel 17		
Jenis Transaksi	<i>Holding period</i> minimal	Kondisi
Transaksi <i>repo-style</i>	5 hari kerja	<i>Remargining</i> harian
Transaksi pasar modal lainnya	10 hari kerja	<i>Remargining</i> harian
<i>Secured lending</i>	20 hari kerja	Valuasi harian

163. Apabila bank memiliki transaksi atau netting set yang memenuhi kriteria pada SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, *holding period* minimal adalah margin period of risk sebagaimana yang berlaku pada paragraf tersebut.

164. Ketika frekuensi dari *remargining* atau revaluasi lebih panjang dari minimal frekuensi yaitu secara harian, nilai *haircut* minimal harus dihitung berdasarkan jumlah hari kerja aktual antara *remargining* atau revaluasi. *Haircut* sebagaimana pada paragraf 156 merupakan *default haircut* dan harus dihitung kembali dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

dimana:

H = *haircut*

H_{10} = *haircut* 10 hari kerja untuk instrumen

N_R = jumlah hari kerja aktual antara *remargining* untuk transaksi pasar modal atau revaluasi untuk transaksi *secured*

T_M = *holding period* minimal sesuai jenis transaksi

(e) Pengecualian untuk transaksi *qualifying repo-style* yang mencakup pelaku utama pasar keuangan pada pendekatan komprehensif

165. OJK dapat mengenakan *haircut* sebesar 0 untuk transaksi *repo-style* dengan pelaku utama pasar keuangan sebagaimana tercantum pada paragraf 145 dan memenuhi kondisi pada paragraf 144.

166. Apabila OJK menerapkan perlakuan tersendiri untuk transaksi *repo-style* dalam surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintahnya maka otoritas di yurisdiksi lain dapat memperbolehkan bank yang berkedudukan di yurisdiksi lain tersebut untuk menerapkan pendekatan yang sama untuk transaksi yang sama.

(iv) *Haircut Floor* Minimum untuk SFTs

167. Paragraf 168 sampai 176 menjelaskan perlakuan untuk transaksi SFT dengan *counterparty* tertentu yang tidak dikliringkan secara sentral (*non-centrally cleared*). Persyaratan tersebut tidak berlaku untuk bank pada yurisdiksi yang tidak memperbolehkan transaksi dengan *haircut* dibawah minimum sebagaimana pada paragraf 172 di bawah ini.

168. *Floor haircut* pada paragraf 172 di bawah ini berlaku untuk transaksi sebagai berikut:

- transaksi SFT yang tidak dikliringkan secara sentral (*non-centrally cleared*) dimana pembiayaan (yaitu pembiayaan uang tunai) terhadap agunan selain surat berharga pemerintah diberikan kepada *counterparty* yang tidak diawasi oleh regulator yang menerapkan persyaratan prudensial sesuai dengan norma internasional.
- transaksi peningkatan agunan (*collateral upgrade transaction*) dengan *counterparty* yang sama. *Collateral upgrade transaction* adalah transaksi dimana bank meminjamkan surat berharga kepada *counterparty* dan *counterparty* menjaminkan surat berharga dengan kualitas yang lebih rendah sebagai agunan, sehingga memungkinkan *counterparty* untuk mempertukarkan surat berharga dengan kualitas yang lebih rendah dengan surat berharga dengan kualitas yang lebih baik. Untuk transaksi dimaksud, *floor* harus dihitung dengan formula pada paragraf 175.

169. SFTs dengan bank sentral tidak dikenakan *floor haircut*.

170. Transaksi peminjaman surat berharga dengan agunan uang tunai dikecualikan dari *haircut floor* apabila:

- surat berharga dipinjamkan (kepada bank) dengan jangka waktu yang panjang dan pihak yang memberikan pinjaman surat berharga menginvestasikan kembali atau memanfaatkan agunan uang tunai dengan jangka waktu yang sama atau lebih pendek, sehingga tidak menyebabkan adanya *mismatch* likuiditas atau jangka waktu yang signifikan.
- surat berharga dipinjamkan (kepada bank) dengan hak opsi untuk membatalkan (*call*) atau jangka waktu yang pendek sehingga menyebabkan adanya *mismatch* likuiditas, hanya apabila pihak yang memberikan pinjaman surat berharga menginvestasikan kembali agunan uang tunai ke dalam dana reinvestasi (*reinvestment fund*) atau rekening yang diatur atau yang memenuhi standar minimal untuk reinvestasi agunan uang tunai oleh pihak pemberi pinjaman surat berharga sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.1 *Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos*.⁶⁹ Dalam hal ini bank dapat mengandalkan pernyataan dari peminjam surat berharga bahwa reinvestasi agunan uang tunai yang dilakukan telah memenuhi standar minimal.

⁶⁹ Dokumen *Financial Stability Board, Strengthening oversight and regulation of shadow banking, Policy framework for addressing shadow banking risks in securities lending and repos, 29 August 2013, www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf.*

171. Bank yang meminjamkan surat berharga dikecualikan dari *haircut floor* pada *collateral upgrade transactions* apabila bank tidak dapat menggunakan kembali, atau memberikan pernyataan bahwa bank tidak dapat atau tidak akan menggunakan kembali surat berharga

yang diterima sebagai agunan terhadap surat berharga yang dipinjamkan.

172. Berikut merupakan daftar *haircut floor* untuk SFT sebagaimana disebutkan di paragraf sebelumnya (lingkup SFTs), dalam bentuk persentase:

Sisa jatuh tempo dari agunan	Tingkat <i>haircut</i>	
	Korporasi dan penerbit lainnya	Produk yang disekuritisasi
surat utang, dan <i>floating rate notes</i> (FRNs) ≤ 1 tahun	0,5%	1%
surat utang > 1 tahun dan ≤ 5 tahun	1,5%	4%
surat utang > 5 tahun dan ≤ 10 tahun	3%	6%
surat utang > 10 tahun	4%	7%
Indeks ekuitas utama	6%	
Aset lainnya dalam lingkup kerangka ini	10%	

173. Lingkup SFTs yang tidak memenuhi *haircut floor* harus diperlakukan sebagai pinjaman yang tidak dijamin (*unsecured loans*) kepada pihak ketiga.

174. Untuk menentukan apakah perlakuan pada paragraf 173 berlaku pada lingkup SFTs (atau *netting set* dari SFTs pada *haircut* level portofolio), maka harus dibandingkan antara agunan *haircut* H (riil atau dihitung dengan ketentuan dibawah ini) dan *haircut floor* f (dari paragraf 172 diatas atau dihitung dengan ketentuan di bawah ini).

175. untuk setiap lingkup SFTs yang tidak termasuk dalam *netting set*, nilai H dan f dihitung sebagai:

- untuk setiap *cash-lent-for-collateral* SFT, H dan f diketahui karena H didefinisikan dengan nilai dari agunan yang diterima dan f ditentukan dalam paragraf 172. Untuk keperluan perhitungan, agunan untuk pemenuhan *margin call* oleh salah satu *counterparty* dapat diperlakukan sebagai agunan yang diterima sejak agunan tersebut diminta (yaitu mendapatkan perlakuan terpisah dari periode penyelesaian).

Sebagai contoh, terdapat suatu transaksi dalam lingkup SFT dimana uang tunai sebanyak 100 dipinjamkan atas surat berharga korporasi sebesar 101 dengan jatuh tempo 12 tahun, maka H adalah 1% [(101-100)/100] dan f adalah 4% (lihat paragraf 172). Oleh karena itu, transaksi dimaksud diperlakukan sebagaimana paragraf 173.

- Untuk setiap *collateral-for-collateral* SFT, meminjamkan agunan A dan menerima agunan B, H tetap didefinisikan dengan nilai agunan yang diterima namun *floor* efektif dari transaksi tersebut harus menggabungkan *floor* dari kedua jenis agunan dan dihitung sebagai berikut:

$$f = \left[\left(\frac{1}{1 + f_A} \right) / \left(\frac{1}{1 + f_B} \right) \right] - 1 = \frac{1 + f_B}{1 + f_A} - 1$$

yang kemudian dibandingkan dengan *haircut* efektif dari transaksi, yaitu:

$$\frac{C_B}{C_A} - 1.$$

Sebagai contoh, terdapat suatu transaksi dalam lingkup SFT dimana nilai surat utang korporasi sebesar 102 dengan jatuh tempo 10 tahun dipertukarkan dengan nilai ekuitas sebesar 104, maka nilai *haircut* H efektif dari transaksi dimaksud yaitu 104/102-1=1,96%

yang kemudian dibandingkan dengan *floor* efektif yaitu $1.06/1.03 - 1 = 2.91\%$. Dengan demikian, SFT dimaksud diperlakukan sebagaimana pada paragraf 173.

176. Untuk *netting* SFT, *floor* "portofolio" efektif dari transaksi harus dihitung dengan :

$$f_{Portofolio} = \left[\left(\frac{\sum_s E_s}{\sum_s E_s \times (1 + f_s)} \right) / \left(\frac{\sum_t C_t}{\sum_t C_t \times (1 + f_t)} \right) \right] - 1$$

Dimana:

- E_s : adalah posisi *net* dari setiap surat berharga (atau uang tunai) s yang merupakan *net* peminjaman (*net lent*)
- C_t : adalah posisi *net* yang merupakan *net* pinjaman (*net borrowed*), dan
- f_s dan f_t : masing-masing adalah *floor haircut* untuk surat berharga yang merupakan *net* peminjaman (*net lent*) dan *net* pinjaman (*net borrowed*).

Sehingga perhitungan ini merupakan bobot tertimbang *floor* dalam portofolio. Portofolio tidak melampaui *floor* apabila:

$$\frac{\sum C_t - \sum E_s}{\sum E_s} \geq f_{Portofolio}$$

Jika *haircut* portofolio melampaui *floor*, maka *netting set* dari SFTs mengacu pada perlakuan sebagaimana dalam paragraf 173. Perlakuan ini harus diterapkan untuk seluruh perdagangan surat berharga yang diterima yang terdapat pada tabel dalam paragraf 172 dan untuk, dalam *netting set*, bank yang juga merupakan penerima *net* surat berharga dimaksud. Untuk keperluan perhitungan, agunan untuk pemenuhan *margin call* oleh salah satu *counterparty* dapat diperlakukan sebagai agunan yang diterima sejak agunan tersebut diminta (yaitu mendapatkan perlakuan terpisah dari periode penyelesaian). Portofolio perdagangan berikut menyajikan contoh mengenai metodologi tersebut diatas diimplementasikan (menunjukkan portofolio yang tidak melampaui *floor*).

Perdagangan aktual	Uang tunai	Surat utang pemerintah	Agunan A	Agunan B
Floor (f_s)	0%	0%	6%	10%
Portofolio perdagangan	50	100	-400	250
E_s	50	100	0	250
C_t	0	0	400	0

$f_{Portofolio}$	-0,0024
$\frac{\sum C_t - \sum E_s}{\sum E_s}$	0

(v) Transaksi derivatif OTC dengan Agunan

177. Berdasarkan pendekatan standar untuk risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk* (SA-CCR)), perhitungan beban modal *counterparty credit risk* untuk individual sebagai berikut:

$$Jumlah\ Eksposur = \alpha \cdot (RC + PFE)$$

Dimana:

Alpha = 1,4

RC = *replacement cost* yang dihitung sesuai SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, dan

PFE = nilai *potential future exposure* yang dihitung sesuai SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

4. **On-balance sheet netting**

178. Apabila bank :

- (a) memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyimpulkan bahwa perjanjian *netting* atau *offsetting* dapat diterapkan pada setiap yurisdiksi yang terkait tanpa memperhatikan apakah *counterparty* mengalami kondisi insolvensi atau kebangkrutan;
- (b) mampu menentukan, setiap saat, aset dan liabilitas dengan *counterparty* yang sama yang merupakan subyek perjanjian *netting*;
- (c) memantau dan mengendalikan risiko *roll-off (roll-off risk)*; dan
- (d) memantau dan mengendalikan eksposur yang relevan secara *net*;

maka bank dapat menggunakan eksposur bersih antara pinjaman dan simpanan sebagai dasar perhitungan kecukupan modal sesuai dengan formula dalam paragraf 154. Aset (pinjaman) diperlakukan sebagai eksposur dan liabilitas (simpanan) diperlakukan sebagai agunan. Nilai *haircut* ditetapkan 0 kecuali terdapat *mismatch* mata uang. *Holding period* 10 hari kerja berlaku ketika *mark-to-market* harian dilakukan. Untuk *on-balance sheet netting*, persyaratan pada paragraf 157, 165 dan 120 sampai 124 harus terpenuhi.

5. **Garansi dan derivatif kredit**

(i) **Persyaratan operasional untuk garansi dan derivatif kredit**

179. Apabila kondisi dibawah ini terpenuhi, bank dapat mengganti bobot risiko dari *counterparty* dengan bobot risiko dari pemberi garansi (*guarantor*).

180. Garansi (kontra garansi (*counter-guarantee*)) atau derivatif kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) mencerminkan klaim langsung kepada penyedia proteksi;
- (b) secara eksplisit terkait langsung dengan eksposur tertentu atau kumpulan eksposur, sehingga perlindungan terdefinisi dengan jelas dan tidak dapat disangkal
- (c) Kontrak proteksi kredit tidak dapat dibatalkan kecuali tidak adanya pembayaran dari pembeli proteksi yang terutang terkait dengan kontrak; dan tidak terdapat klausul dalam kontrak yang memungkinkan penyedia proteksi secara sepihak membatalkan proteksi kredit atau menambah biaya perlindungan akibat kualitas kredit yang memburuk dalam eksposur yang dilindungi; ⁷⁰
- (d) harus bersifat tanpa syarat (*unconditional*); tidak terdapat klausula dalam kontrak proteksi yang berada di luar pengendalian bank yang dapat mencegah penyedia proteksi memiliki kewajiban untuk membayar tepat waktu dalam hal terdapat kejadian

kegagalan pembayaran dari *counterparty*.

⁷⁰ Pemberi garansi tidak boleh mengubah jatuh tempo yang telah disetujui setelah perjanjian dibuat.

181. Apabila terdapat *maturity mismatch*, nilai proteksi kredit yang diberikan harus disesuaikan mengacu pada paragraf 120 sampai 124.

(ii) Persyaratan operasional khusus untuk garansi

182. Selain persyaratan kepastian hukum dalam paragraf 119, agar garansi dapat diakui, persyaratan berikut juga harus dipenuhi:

- (a) Dalam hal *counterparty* mengalami kondisi *default*/tidak melakukan pembayaran, bank dapat langsung meminta pembayaran kepada pemberi garansi berdasarkan dokumen yang mengatur mengenai transaksi. Pemberi garansi dapat memberikan langsung seluruh pembayaran (*lump sum payment*) berdasarkan dokumentasi kepada bank atau pemberi garansi dapat menanggung pembayaran kewajiban yang diproteksi oleh garansi di masa yang akan datang. Bank harus memiliki hak untuk menerima segala jenis pembayaran dari pemberi garansi tanpa harus melakukan tindakan hukum dalam rangka mendapatkan pembayaran dari *counterparty*.
- (b) Garansi adalah kewajiban yang terdokumentasi secara eksplisit dari pemberi garansi.
- (c) Garansi menjamin seluruh jenis pembayaran yang akan dibayarkan oleh *counterparty* berdasarkan dokumen yang mengatur transaksi, sebagai contoh nilai nosional, pembayaran *margin* dsb. Kecuali apabila garansi hanya menjamin pembayaran pokok, maka bunga dan pembayaran lain yang tidak diproteksi harus diperlakukan sebagai nilai yang tidak dijamin sesuai dengan aturan proporsionalitas yang dijelaskan pada paragraf 190.

(iii) Persyaratan operasional spesifik untuk derivatif kredit

183. Selain persyaratan kepastian hukum dalam paragraf 119, persyaratan berikut juga harus dipenuhi agar kontrak derivatif kredit dapat diakui:

- (a) *credit event* yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mencakup setidaknya hal-hal sebagai berikut:
 - kegagalan untuk membayar nilai yang terutang berdasarkan persyaratan atas kewajiban yang mendasari yang berlaku pada saat terjadinya kegagalan (dengan *grace period* yang sesuai dengan *grace period* kewajiban yang mendasari);
 - kebangkrutan, insolvensi atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar utangnya, atau kegagalan atau pernyataan tertulis ketidakmampuan membayar utangnya saat jatuh tempo, dan kejadian serupa; dan
 - restrukturisasi ⁷¹ kewajiban yang mendasari yang mencakup penghapusan atau penundaan pokok, bunga atau biaya lainnya (*fee*) yang menyebabkan suatu *credit loss event* (yaitu *write-off*, pencadangan khusus atau sejenisnya pada akun laba-rugi).
- (b) apabila derivatif kredit memproteksi kewajiban yang tidak mencakup kewajiban yang mendasarinya, poin (g) dibawah ini mengatur apakah *mismatch* aset diperbolehkan.
- (c) derivatif kredit tidak dapat dihentikan sebelum berakhirnya setiap *grace period* yang

disyaratkan untuk suatu kondisi *default* atas kewajiban yang mendasarinya, sebagai akibat dari kegagalan pembayaran. Dalam hal terdapat *maturity mismatch*, maka paragraf 120 sampai 124 harus diterapkan.

- (d) derivatif kredit memperbolehkan penyelesaian uang tunai diakui untuk tujuan permodalan sepanjang terdapat proses valuasi yang memadai untuk mengestimasi kerugian secara andal. Harus terdapat periode yang jelas dalam melakukan valuasi setelah terjadinya *credit-event* dari kewajiban yang mendasari. Apabila kewajiban yang menjadi acuan dalam derivatif kredit untuk tujuan penyelesaian kewajiban berbeda dari kewajiban yang mendasari, poin (g) di bawah ini mengatur mengenai *asset mismatch*.
- (e) apabila hak atau kemampuan pembeli proteksi untuk memindahkan kewajiban yang mendasari kepada penyedia proteksi disyaratkan untuk penyelesaian, syarat dari kewajiban yang mendasari harus menyatakan bahwa persetujuan untuk pemindahan tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa alasan yang memadai.
- (f) Identitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan apakah *credit event* telah terjadi harus didefinisikan secara jelas. Penentuan tersebut tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab penjual proteksi. Pembeli proteksi harus mempunyai hak/kemampuan untuk menginformasikan kepada penjual proteksi mengenai kejadian *credit event*.
- (g) Kondisi *mismatch* antara kewajiban yang mendasari dan kewajiban yang menjadi acuan dalam derivatif kredit (yaitu kewajiban yang digunakan untuk menentukan nilai penyelesaian uang tunai atau kewajiban yang akan diselesaikan) diperbolehkan apabila (1) kewajiban yang menjadi acuan tersebut memiliki peringkat *pari passu* atau lebih junior dibandingkan kewajiban yang mendasari, dan (2) kewajiban yang mendasari dan kewajiban yang menjadi acuan berasal dari obligor yang sama (yaitu entitas hukum yang sama) dan terdapat klausul *cross-default* atau *cross-acceleration* yang dapat dieksekusi secara hukum.
- (h) Kondisi *mismatch* antara (a) kewajiban yang mendasari dan (b) kewajiban yang digunakan untuk menentukan apakah *credit event* telah terjadi diperbolehkan apabila (1) kewajiban pada poin (b) memiliki peringkat *pari passu* atau lebih junior dari kewajiban yang mendasari, dan (2) kewajiban yang mendasari dan kewajiban yang menjadi acuan berasal dari obligor yang sama (yaitu entitas hukum yang sama) dan terdapat klausul *cross-default* atau *cross-acceleration* yang dapat dieksekusi secara hukum.

⁷¹ ketika melakukan lindung nilai eksposur korporasi, *credit event* dimaksud tidak dipersyaratkan untuk diperinci apabila (i) 100% hak suara diperlukan untuk mengubah jatuh tempo, pokok, kupon, mata uang atau status senioritas dari eksposur korporasi yang mendasari; (ii) domisili hukum dimana eksposur korporasi diatur memiliki aturan kondisi kebangkrutan yang memadai yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan reorganisasi/restrukturisasi dan melakukan setelmen tagihan kreditur sesuai dengan karakteristik tagihan. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perlakuan pada paragraf 184 dapat diterapkan.

184. Apabila restrukturisasi kewajiban yang mendasari tidak diproteksi oleh derivatif kredit, namun persyaratan lainnya dalam paragraf 183 terpenuhi, maka pengakuan derivatif kredit parsial dapat diperbolehkan. Jika nilai derivatif kredit kurang dari atau sama dengan nilai

kewajiban yang mendasari, maka 60% nilai dari lindung nilai dapat diakui. Jika nilai dari derivatif kredit lebih besar dari kewajiban mendasari, maka nilai lindung nilai yang dapat diakui dibatasi maksimal sebesar 60% dari nilai kewajiban yang mendasari.

(iv) Jenis pemberi garansi (pemberi kontra garansi)/penyedia proteksi dan derivatif kredit yang diakui

185. Proteksi kredit yang diberikan oleh entitas berikut ini dapat diakui apabila memiliki bobot risiko yang lebih rendah dari *counterparty* sebagai berikut:

- entitas pemerintah,⁷² entitas sektor publik, *multilateral development bank* (MDB), perusahaan sekuritas, dan institusi keuangan lain yang diatur oleh otoritas dengan bobot risiko lebih rendah dari *counterpart* ⁷³.
- untuk :
 - entitas lain yang memiliki peringkat eksternal kecuali apabila proteksi kredit diberikan untuk eksposur sekuritisasi. Hal ini termasuk proteksi kredit yang diberikan oleh perusahaan induk, perusahaan anak dan perusahaan yang terafiliasi ketika perusahaan tersebut memiliki bobot risiko yang lebih rendah dari obligor;
 - entitas lain yang saat ini diberikan peringkat eksternal BBB- atau lebih baik dan sebelumnya diberikan peringkat A- atau lebih baik pada saat proteksi kredit diberikan untuk eksposur sekuritisasi. Ini termasuk proteksi kredit yang diberikan oleh perusahaan induk, perusahaan anak dan perusahaan yang terafiliasi ketika perusahaan tersebut memiliki bobot risiko yang lebih rendah dari obligor.

⁷² Termasuk *Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Central Bank, the European Union, the European Stability Mechanism (ESM)* dan *the European Financial Stability Facility (EFSF)*, serta *MDB* yang memenuhi syarat untuk bobot risiko 0% sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 13 dan disebutkan pada *footnote* 10.

⁷³ Suatu institusi keuangan yang diatur berdasarkan prinsip kehati-hatian didefinisikan sebagai: entitas hukum yang diawasi oleh regulator yang menerapkan persyaratan kehati-hatian yang konsisten dengan norma-norma internasional atau entitas hukum (perusahaan induk atau perusahaan anak) yang termasuk dalam grup konsolidasi di mana setiap entitas hukum yang substansial dalam grup konsolidasi diawasi oleh regulator yang menerapkan persyaratan kehati-hatian yang konsisten dengan norma-norma internasional. Entitas tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perusahaan asuransi yang diatur berdasarkan prinsip kehati-hatian, *broker/dealer, thrifts* dan *futures commission merchants, dan qualifying central counterparties* sebagaimana didefinisikan dalam dokumen *Regulatory capital requirements framework for bank exposures to central counterparties*, Juli 2012, www.bis.org/publ/bcbs227.pdf.

186. Hanya *credit default swaps* dan *total return swaps* yang memberikan proteksi kredit setara dengan garansi group yang memenuhi syarat untuk diakui. ⁷⁴ Namun, terdapat pengecualian apabila bank membeli proteksi kredit dalam bentuk *total return swap* dan mencatat pembayaran bersih yang diterima dari *swap* sebagai pendapatan bersih (*net income*), tetapi tidak mencatat penurunan nilai yang saling hapus dari aset yang diproteksi (baik melalui pengurangan nilai wajar atau dengan penambahan cadangan), maka proteksi kredit tidak dapat diakui.

⁷⁴ *Cash-funded credit-linked notes* yang diterbitkan oleh bank terhadap eksposur dalam *banking book* yang memenuhi semua persyaratan minimum untuk derivatif kredit diperlakukan sebagai transaksi dengan agunan uang tunai. Namun demikian, dalam hal ini batasan mengenai penyedia perlindungan sebagaimana diatur dalam paragraf 185 tidak berlaku.

187. *First-to-default* dan derivatif kredit *nth-to-default* (yaitu dimana bank menerima proteksi kredit untuk sejumlah kredit dan apabila *first-* atau *nth-to-default* diantara sejumlah kredit tersebut memicu proteksi kredit dan menghentikan perjanjian) tidak dapat diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sehingga tidak dapat memberikan keringanan persyaratan modal. Untuk transaksi dimana bank memberikan proteksi kredit melalui instrumen dimaksud, maka berlaku pengaturan dalam paragraf 86.

**(v) Perlakuan bobot risiko untuk transaksi dengan proteksi kredit yang diakui
Perlakuan bobot risiko secara umum**

188. Porsi yang diproteksi diberikan bobot risiko pemberi proteksi. Porsi yang tidak diproteksi dikenakan bobot risiko *counterparty* yang mendasari.

189. *Threshold* materialitas untuk pembayaran dibawah ini dimana pemberi proteksi dikecualikan dari pembayaran dalam "*event of loss*" setara dengan "*retained first-loss positions*". Porsi eksposur yang di bawah *threshold* materialitas harus dikenakan bobot risiko 1.250% oleh bank yang membeli proteksi kredit.

Proteksi proporsional

190. Apabila kerugian didistribusikan secara pari passu dengan perhitungan pro rata antara bank dengan pemberi garansi, maka keringanan persyaratan permodalan juga dikenakan secara proporsional, yaitu porsi eksposur yang diproteksi diperlakukan sebagaimana porsi dengan garansi yang memenuhi syarat/derivatif kredit, sedangkan porsi eksposur yang tidak diproteksi diperlakukan sebagai porsi yang tidak dijamin.

Proteksi "*tranche*"

191. apabila bank mengalihkan sebagian risiko dari eksposur ke dalam satu atau lebih "*tranche*" kepada satu atau beberapa penjual proteksi dan masih memiliki bagian risiko dari pinjaman, dan terdapat perbedaan senioritas antara risiko yang dialihkan dan risiko yang masih dimiliki, bank dapat memperoleh proteksi kredit baik untuk "*senior tranche*" (misal "*the second-loss portion*") atau "*junior tranche*" (misal "*the first-loss portion*"). Dalam hal ini berlaku pengaturan sebagaimana yang diterapkan untuk sekuritisasi

(vi) *Currency mismatches*

192. Apabila proteksi kredit dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang eksposur (terdapat *currency mismatches*), maka nilai eksposur yang diproteksi harus dikurangi dengan

haircut H_{FX} , yaitu :

$$G_A = G \cdot (1 - H_{FX})$$

dimana:

G = nilai dari proteksi kredit

H_{FX} = haircut yang sesuai untuk *currency mismatch* antara proteksi kredit dan kewajiban yang mendasari.

Haircut untuk *currency mismatch* dengan periode *holding* selama 10 hari kerja (dengan asumsi *mark-to market* harian) adalah 8%. Haircut ini harus dihitung dengan formula pada paragraf 164 bergantung pada dari frekuensi revaluasi proteksi kredit.

(vii) Garansi dan kontra garansi pemerintah

193. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf 7, bobot risiko yang lebih rendah dapat diberikan berdasarkan diskresi nasional untuk eksposur kepada pemerintah (atau bank sentral) dimana bank berkedudukan dan apabila eksposur berdenominasi dalam mata uang domestik dan dibiayai dengan mata uang domestik tersebut. Otoritas dapat menerapkan perlakuan tersebut untuk porsi eskposur yang digaransi oleh pemerintah (atau bank sentral) apabila garansi diberikan dalam mata uang domestik dan eksposur dibiayai dengan denominasi mata uang domestik tersebut. Suatu eksposur dapat juga diproteksi oleh garansi yang secara tidak langsung memiliki kontra garansi dari pemerintah. Eksposur tersebut dapat diperlakukan sebagai eksposur yang digaransi oleh pemerintah apabila :

- (a) kontra garansi pemerintah memberikan proteksi seluruh elemen risiko kredit dari eksposur;
- (b) garansi dan kontra garansi memenuhi seluruh persyaratan operasional sebagai garansi, kecuali kontra garansi tidak perlu bersifat langsung dan eksplisit terhadap eksposur asal; dan
- (c) OJK meyakini bahwa proteksi memadai dan tidak terdapat bukti historis yang menunjukkan proteksi dari kontra garansi kurang efektif dibandingkan dengan garansi yang diberikan langsung oleh pemerintah.